

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA WISATA
BAHARI GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(PAD)

(Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**IMRON ROSYADI
NIM. 115030607111020**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

MALANG

2018

MOTO

*"Ojo obah yen atimu kemranyah
mending meneng nganti atimu lerem"*

*"lebih baik diam ketika hati dalam keadaan
emosi (sabar), sampai emosi itu mereda"*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Wisata Bahari Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Imron Rosyadi

NIM : 115030607111020

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Malang, 28 Februari 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Tjahjanulin Domai, Dr, MS
NIP. 19531222 198010 1 001



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 April 2018
Jam : 11.00
Skripsi atas nama : Imron rosyadi
Judul : Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Wisata
Bahari Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”
(Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Malang)
dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Anggota,

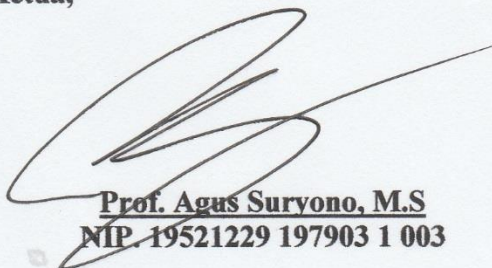


Tjahjanulin Domai, Dr, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

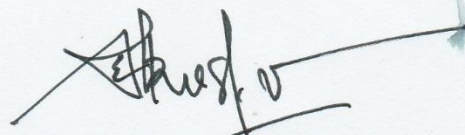
Ketua,



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001
Anggota,



Prof. Agus Suryono, M.S
NIP. 19521229 197903 1 003



I Gede Eko Putra Sri S, PhD
NIP.201107 831204 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 07 Februari 2018



Nama : Imron Rosyadi

NIM : 115030607111020

*Kupersembahkan Karyaku
Untuk Ibu dan Bapak Tercinta
Atas Tetesan Keringat,
Tangis dan Doanya*

RINGKASAN

Imron Rosyadi, 2018, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Wisata Bahari Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Malang) Komisi Pembimbing: (1) Tjahjanulin Domai, Dr, MS (2) Dr. Hermawan, S.IP, M.Si

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang sebagian wilayahnya memiliki berbagai obyek wisata yang dapat dioptimalkan. Banyak sekali tujuan wisata Kabupaten Malang yang menarik pengunjung, mulai dari wisata alam, bahari, agro, budaya, religi, sejarah, pendidikan, belanja, kuliner, dan buatan. Salah satu tujuan wisata yang paling banyak menarik turis asing adalah kawasan Bromo-Tengger-Semeru. Disamping itu kabupaten Malang juga memiliki daya tarik wisata yang lain, seperti pantai balekambang dan pantai ngliyep serta pantai lainnya yang termasuk dalam wisata bahari. Dengan banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Malang, seharusnya diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi lebih mendalam dan menganalisis upaya pemerintah daerah di bidang pariwisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara observasi, wawancara, data sekunder dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa dengan menggunakan model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penggambaran dan penarikan kesimpulan.

Hasil peneliian ini memperlihatkan bawasanya kurang optimalnya upaya pemerintah daerah serta kurang adanya sinergitas antar pihak dalam mengelola potensi wisata bahari. Hal ini dapat dilihat dari Pengadaan fasilitas yang kurang merata untuk wisata bahari di kabupaten malang, Peningkatan keamanan dapat merata di semua wisata bahari yang ada di kabupaten Malang, Kurangnya kesadaran wisatawan akan kebersihan lingkungan di lokasi dan situs budaya serta kurangnya jumlah petugas kebersihan yang ada di wisata bahari, Belum tersedianya trayek untuk angkutan umum yang membawa wisatawan ke lokasi wisata, Pemanfaatan hasil alam oleh penduduk lokal untuk dijadikan cinderamata untuh menambah pendapatan dan juga dapat membuka lapangan kerja baru. Kontribusi wisata bahari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang, pengelolaan pendapatan melalui retribusi objek wisata, pajak hotel dan restoran, serta pajak hiburan dirasa kurang terkoordinasi dengan baik dan merata.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pariwisata, PAD

SUMMARY

Imron Rosyadi, 2018, Efforts of Local Government In Managing Marine Tourism To Increase Local Original Income (PAD) (Study On Culture And Tourism Office of Malang Regency) Supervising Commission: (1) Tjahjanulin Domai, Dr, MS (2) Dr. Hermawan, S.IP, M.Si

Malang Regency is one of the districts located in East Java Province which some areas have various tourism objects that can be optimized. Many tourist destination of Malang Regency that attract visitors, ranging from nature tourism, maritime, agro, culture, religion, history, education, shopping, culinary, and artificial. One of the most attractive tourist destinations is the Bromo-Tengger-Semeru region. Besides Malang district also has other tourist attraction, such as balekambang beach and ngliyep beach and other beaches included in marine tourism. With the many tourism potentials owned by Malang Regency, should be balanced with the maximum management so as to increase the local revenue.

This research is conducted to obtain more in-depth information and analyze the efforts of local government in the field of tourism to increase local revenue. The research uses qualitative method and descriptive approach. The data collection used by writer is by observation, interview, secondary data and documentation. While the analysis technique using an interactive model consisting of data collection, data condensation, data presentation, drawing and drawing conclusions.

The results of this study shows that the lack of optimal local government efforts and lack of synergy between parties in managing the potential of marine tourism. This can be seen from the procurement of facilities that are uneven for marine tourism in malang regency, Improved security can be evenly distributed in all marine tourism in Malang Regency, Lack of awareness of the tourists on the cleanliness of the environment in the location and cultural sites and the lack of number of janitor in the marine tourism, unavailability of routes for public transport that bring tourists to tourist sites, Utilization of natural products by local residents to be used as souvenirs to increase income and can also open new jobs. The contribution of marine tourism in increasing local government revenue (PAD) in Malang Regency, the management of income through the retribution of tourist attraction, hotel and restaurant tax, and entertainment tax is less well coordinated and evenly distributed.

Keywords: Local Government, Tourism, Local Government Revenue

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perencanaan Strategis Pengembangan Minapolitan (Studi Pada Desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)” dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M. Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Ketua Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya serta selaku Anggota Komisi Pembimbing.
4. Bapak Tjahjanulin Domai, Dr, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

6. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang
7. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai Balai Wisata kabupaten Malang.
8. Pengunjung wisata Kabupaten Malang.
9. Bapak Ibu.
10. Teman-teman.
11. Teman-teman Kontrakan
12. Semua teman-teman Perencanaan Pembangunan Angkatan 2011 yang telah menjadi keluarga kedua yang selalu berbagi duka dan senang.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 07 Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

MOTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 12
A. Administrasi Pembangunan	12
B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	16
1. Pengertian Desentralisasi	16
2. Pengertian Otonomi Daerah	18
3. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah	19
4. Tujuan Otonomi Daerah.....	21
C. Pemerintah Daerah	22
D. Pariwisata	23
1. Pariwisata Dalam Pembangunan	24
2. Jenis jenis pariwisata.....	28
3. Objek Dan Daya Tarik Wisata	31
4. Sarana dan Prasarana Wisata.....	32
5. Pengembangan Pariwisata.....	35
6. Upaya pengembangan pariwisata.....	39
E. Pendapatan Asli Daerah	45
1. Upaya PAD Dalam Bidang Pariwisata.....	47
2. Sumber – Sumber PAD yang Berhubungan dengan Pariwisata	47
 BAB III METODE PENELITIAN	 51

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Fokus Penelitian.....	52
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	53
D. Jenis dan Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Instrumen Penelitian.....	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	59
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	59
2. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	67
F. Analisis Data	76
B. Penyajian Data	80
1. Upaya pemerintah daerah dalam mengelola wisata bahari guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang	80
a. Kuantitas dan kualitas fasilitas di objek wisata	81
b. Keamanan dan kenyamanan objek wisata	87
c. Keasrian objek wisata	90
d. Sarana dan prasarana transportasi menuju objek wisata.....	93
e. Kualitas cinderamata untuk wisatawan.....	94
2. Kontribusi wisata bahari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang pada tahun 2014 – 2016.	96
a. Retribusi objek wisata.....	96
b. Pajak hotel dan restoran	100
c. Pajak hiburan	103
C. Analisis Data	104
1. Upaya pemerintah daerah dalam mengelola wisata bahari guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang	104
a. Kuantitas dan kualitas fasilitas di objek wisata	105
b. Keamanan dan kenyamanan objek wisata	106
c. Keasrian objek wisata	108
d. Sarana dan prasarana transportasi menuju objek wisata.....	110
e. Kualitas cinderamata untuk wisatawan.....	111
2. Kontribusi wisata bahari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang pada tahun 2014 – 2016.	113
a. Retribusi objek wisata.....	113
b. Pajak hotel dan restoran	115
c. Pajak hiburan	119
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN.....	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan.....	15
Tabel 2. Luas wilayah menurut kecamatan, tahun 2015	64
Tabel 3. Perkembangan Pendudukan Tahun 2006 – 2010	65
Tabel 4. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2011-2015	66
Tabel 5. Data kunjungan wisatawan 2014	95
Tabel 6. Jumlah Wisatawan	96
Tabel 7. Jumlah Wisatawan 2016	96
Tabel 8. Target dan realisasi pada efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Malang tahun 2009 – 2013.....	96
Tabel 9. Kontribusi realisasi pajak hotel, restoran dan PAD Kabupaten Malang Tahun 2009 – 2013	97
Tabel 10. Kontribusi realisasi pajak hotel, restoran dan pajak daerah Kabupaten Malang tahun 2009 – 2013	98
Tabel 11. Efektifitas Pajak Hotel Kabupaten Malang 2007 – 2011.....	114
Tabel 12. Efektifitas Pajak Restoran Kabupaten Malang 2007 – 2011	114
Tabel 13. Efektifitas Pajak Hiburan Kabupaten Malang 2007 – 2011	116
Tabel 14. Pertumbuhan Pengunjung	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldana	60
Gambar 2. Peta Kabupaten Malang	63
Gambar 3. DISPARBUD Kab. Malang	74
Gambar 4. Locket masuk pantai balekambang	80
Gambar 5. Kantor pelayanan.....	80
Gambar 6 Kamar mandi (toilet umum).....	81
Gambar 7. Penginapan	81
Gambar 8. Gazebo.....	81
Gambar 9. Mushola.....	82
Gambar 10. Pantai Ngliyep	84
Gambar 11. Wawancara dengan petugas keamanan	85
Gambar 12. Wawancara dengan petugas keamanan (Dinas Perhutani).....	86
Gambar 13. Pulau Ismoyo.....	87
Gambar 14. Foto wawancara pantai ngliyep.....	89
Gambar 15. Cinderamata	92
Gambar 16. Cinderamata (Produk unggulan dari bahan kerang).....	92
Gambar 17. Paguyupan pedagang pisang	94
Gambar 18. Kontribusi Pajak Hiburan.....	99
Gambar 19. Kontribusi Restribusi Jasa Usaha.....	111
Gambar 20. PAD Kab Malang	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki wilayah laut sangat luas 5,8 juta km² yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut tersebut terdapat sekitar 17.500 lebih dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Fakta fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia. Selain peran geopolitik, wilayah laut kita juga memiliki peran geekonomi yang sangat penting dan strategis bagi kejayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. (Hardiana, 2014)

Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikaruniai berbagai macam ekosistem pesisir dan laut (seperti pantai berpasir, goa, laguna, estuaria, hutan mangrove, padang lamun, rumput laut, dan terumbu karang) yang paling indah dan relatif masih 'perawan' (*pristine, unspoiled*) (Mann, 1992). Diantara sepuluh ekosistem terumbu karang terindah dan terbaik di dunia, enam berada di tanah air yakni Raja Ampat, Wakatobi, Taka Bone Rate, Bunaken, Karimun Jawa, dan Pulau Weh (CNN, 2017). Ringkasnya, kawasan pesisir dan laut Indonesia merupakan tempat ideal bagi seluruh jenis aktivitas pariwisata bahari yang meliputi: (1) *sun bathing at the beach or pool*; (2) *ocean or freshwater swimming*; (3) *beachside and*

freshwater sports such as water scooter, sausage boat, water tricycle, wind surfing, surfboarding, paddle board, parasailing, kayacking, catamarans, etc; (4) *pleasure boating*; (5) *ocean yachting*; (6) *cruising*; (7) *fishing*; (8) *diving, snorkeling, glass boat viewing and underwater photography*; (9) *marine parks*; (10) *canoeing*; and (11) *coastal parks, wild life reserves, rain forest, gardens and trails, fishing villages*.

Jika pemerintah mampu mengembangkan potensi bahari, maka nilai ekonomi berupa perolehan devisa, sumbangan terhadap PDB, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan sejumlah *multiplier effects* sangat besar. Sebagai perbandingan adalah Negara Bagian Queensland, Australia dengan panjang garis pantai hanya 2100 km dapat meraup devisa dari pariwisata bahari sebesar US\$ 2,1 milyar pada tahun 2003. Demikian juga halnya dengan Malaysia, Thailand, Maladewa, Mauritius, Jamaica, dan Negara lainnya yang telah menikmati nilai ekonomi cukup besar dari pariwisata bahari. Sampai saat ini devisa dari sektor pariwisata bahari di Indonesia baru mencapai sekitar US 1 milyar per tahun.

Potensi wisata bahari yang sangat besar tersebut memang tidak berpengaruh sangat besar terhadap pendapatan negara Indonesia. Kondisi saat ini kontribusi wisata bahari terhadap pendapatan devisa Indonesia hanya 10 persen. Jika pendapatan devisa sekitar US\$ 10 miliar, maka wisata hanya berkontribusi sebesar US\$ 1 miliar. Sedangkan di Malaysia, wisata bahari mampu berkontribusi besar terhadap pendapatan devisanya. Setidaknya saat ini pendapatan devisa dari wisata bahari di negara tersebut mencapai US\$ 8 miliar

per tahun. Malaysia, 40 persen pendapatan devisanya dari wisata bahari. Jadi dari US\$ 20 miliar, wisata baharinya berkontribusi sebesar US\$ 8 miliar. Ini 8 kali lipat dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia meningkatkan kinerja sektor pariwisata bahari perlu memperhatikan lima komponen utama dari sisi pengadaan (*supply side*) pariwisata bahari, yakni objek pariwisata bahari (*attractions*), transportasi, pelayanan, promosi, dan informasi, harus secara terpadu diperkuat dan dikembangkan, sehingga lebih atraktif atau minimal sama dengan yang ditawarkan oleh negara-negara lain. Selain itu, sektor pariwisata bahari harus didukung oleh kebijakan politik-ekonomi (keuangan, ketenagakerjaan, infrastruktur, keamanan dan kenyamanan, dan kebijakan pemerintah lainnya) yang kondusif.

Upaya pemerintah sejauh ini untuk mengelola wisata bahari dengan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu amanat dari pertemuan Bumi (*Earth Summit*) yang diselenggarakan tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Dalam forum global tersebut, pemahaman tentang perlunya pembangunan berkelanjutan mulai disuarakan dengan memberikan definisi sebagai pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Selain itu melalui keterpaduan, sifat keterpaduan dalam pembangunan kelautan menghendaki koordinasi yang mantap, mulai tahapan perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pemantauan serta pengendaliannya. Sehingga,

dibutuhkan visi, misi, strategi, kebijakan dan perencanaan program yang mantap dan dinamis. Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan salah satu upaya Pemerintah juga dalam mengelola wisata bahari. Dalam konteks ini pula, kemudian konsep CBM (*community based management*) dan CM (*Co-Management*) muncul sebagai “*policy bodies*” bagi semangat “kebijakan dari bawah” (*bottom up policy*) yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengupayakan dalam pengelolaan wisata bahari namun usaha tersebut belum membuahkan hasil. Karena pertama adalah aksesibilitas ke lokasi wisata bahari yang terbilang rendah dan sulit. Misalnya, buruknya akses untuk transportasi yang jalannya dipenuhi tanah, berbatu, sehingga rawan akan keselamatan. Kedua jumlah dan variasi objek wisata (*attractions*) terbatas, serta kurang mengindahkan daya dukung dan kualitas lingkungan. Hal itu dapat terlihat dari menurunnya kualitas pantai, terumbu karang, dan mangrove. Ketiga, kebijakan politik-ekonomi (seperti moneter, fiskal, keamanan melakukan usaha, dan konsistensi kebijakan pemerintah) yang belum begitu kondusif bagi tumbuh-kembangnya pariwisata bahari. Padahal, potensi wisata bahari yang baik dapat menjadi peluang bagi para investor untuk dapat menanamkan modalnya.

Seperti halnya potensi bahari yang ada di Kabupaten Malang juga memiliki kesempatan untuk lebih berkembang. Banyak sekali tujuan wisata Kabupaten Malang yang menarik pengunjung, mulai dari wisata alam, bahari, agro, budaya, religi, sejarah, pendidikan, belanja, kuliner, dan buatan. Tujuan

wisata yang paling banyak menarik turis asing adalah kawasan Bromo-Tengger-Semeru. Selain itu, wisata bahari dan alam juga banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik, seperti pantai, sumber mata air dan air terjun.

Setiap obyek wisata memiliki karakteristik tertentu. Misalnya saja Pantai Balekambang yang memiliki pulau kecil seperti yang ada di Tanah Lot Bali. Pantai Banyu Anjlok yang memiliki air terjun di pinggir pantai. Pantai Tiga Warna yang memiliki tiga warna laut yang berbeda. Pantai Sendang Biru sebagai pintu masuk menuju Pulau Sempu yang unik. Ataupun Coban Pelangi kalau lagi beruntung bisa melihat pelangi di air terjunnya. Air Terjun Sumber Pitu dimana kita bisa melihat banyak sekali air terjun yang keluar dari tebing-tebingnya. Masih banyak obyek wisata lainnya dengan keunikan masing-masing.

Namun, akses menuju ke beberapa tempat wisata itu yang masih terbatas, masih ada yang belum dikelola dengan baik, lokasi tersembunyi, jalan tidak layak, bahkan tak jarang pengunjung harus memacu adrenalin untuk mencapai tempat wisata tersebut. Bagi sebagian orang, tepatnya sebagian mahasiswa, menganggap bahwa kondisi seperti itu yang dicari karena keseruannya, masih alami dan memacu adrenalin.

Menurut Data BPS Kabupaten Malang, jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Malang sebanyak 69 obyek wisata dimana yang terbanyak wisata pemandian dan pantai. Banyaknya obyek wisata yang penuh daya tarik itu menjadi tantangan bagi pemerintah setempat untuk mengelolanya. Kondisi

geografis yang berada di wilayah ketinggian atau pegunungan dan pantai merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan.

Dari hasil sebuah riset yang dilakukan oleh Muhammad Rizal (2015) mahasiswa Universitas Negeri Malang di Pantai Balekambang salah satunya. Dari hasil ini ditemukan bahwa rata-rata perkembangan retribusi sektor pariwisata sebesar 1,22% dan rata-rata kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 0,03% . Retribusi Sektor Pariwisata dapat ditingkatkan minimal 0,10 dan maksimal sebesar 0,12%. Ada 2 jenis upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peluang pariwisata di Kabupaten Malang yaitu upaya intensifikasi dan eksentifikasi. Pendapatan tersebut hanya di salah satu wisata bahari di Kabupaten Malang.

Sampai saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang dari sektor pariwisata masih terbilang kurang dibandingkan dengan begitu banyaknya destinasi wisata yang ada, khususnya wisata pantai. Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, dengan total wisatawan yang datang sekitar 5,8 juta tahun 2016, sekitar 60 persen masih didominasi kunjungan ke pantai. "Tahun 2016 wisatawan yang ke pantai mencapai 3,6 juta dari total kunjungan," kata Made Arya Wedanthara, kepala Disparbud Kabupaten Malang.

Magnet wisata pantai masih menjadi pilihan utama para wisatawan, baik dalam maupun mancanegara saat berkunjung ke Kabupaten Malang. padahal, potensi melimpah kawasan pantai di wilayah Malang Selatan ini belum digarap secara optimal dalam mengerek PAD yang berekses pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. PAD pariwisata Kabupaten Malang sebesar Rp 1,2 Miliar tahun 2016 dinilai masih kurang dibandingkan potensi alam, air, dan budayanya yang berlimpah. "Menjadi ironi saat potensi yang berlimpah terkendala karena adanya regulasi pengelolaan yang tidak bisa diselesaikan dan saling menunjang,"

Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan, pariwisata Kabupaten Malang memiliki beragam warna, seperti wisata alam berbasis pantai, pegunungan yang memberikan destinasi keindahan alam. Kabupaten Malang memiliki itu semua, dicontohkan wisata pantai.

Diungkapkan, *grand desaign* pengembangan pariwisata Kabupaten Malang, tidak lain merupakan respon dari kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan 10 destinasi wisata nasional. Pernyataan Pak Rendra pada detiknews.com menjelaskan, khusus potensi wisata pantai, pihaknya sudah mendorong pemerintah desa segera membangun MoU dengan Perhutani. Karena di luar sebelum garis pantai, Perhutani-lah yang memiliki lahan. Sehingga sangat tidak mungkin Pemkab Malang dapat masuk tanpa adanya komunikasi baik antara Pemerintah Desa bersama Perhutani.

"Pantai jadi salah satu andalan, karena kita memiliki cukup banyak. Saya sudah mendorong Pemdes untuk melakukan pendekatan hingga terlahir sebuah MoU dengan Perhutani. Karena Perhutani pemegang wilayah kehutanan di pinggir pantai tersebut, selama ini kita kesulitan untuk *all out* memaksimalkan potensi wisata pantai, karena Perhutani ada disana. Ini sangat berbeda dengan Bali, Lombok, NTB, maupun NTT. Yang mana di wilayah itu, tidak ada Perhutani sehingga Pemda dapat leluasa mengeksplorasi potensi wisata pantainya,".

Pak Rendra Kresna menambahkan, bila MoU tersebut sudah tercipta. Maka Pemkab Malang akan dapat mendukung dengan kebijakan peningkatan infrastruktur jalan, kemudian fasilitas pendukung lainnya. Pihaknya menyambut baik, akan hadirnya badan otoritas pengembangan pariwisata. Dimana, hal itu dapat memberikan fasilitas kepada Pemkab Malang dalam mengembangkan pariwisata lokal. Beberapa tempat sudah dijadikan *pilot project* untuk dikembangkan bersama badan dibawah kendali langsung pemerintah pusat tersebut. Sedangkan menurut hasil observasi peneliti secara singkat mengamati adanya pembangunan-pembangunan misalnya jalur lintas selatan. Maupun penambahan fasilitas di wilayah wisata bahari.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Malang sudah berupaya untuk mengelolah wisata bahari dengan sangat baik namun masih banyak kekurangan yang belum dapat diperbaiki hingga saat ini. Misalnya menurut hasil observasi atau prariset peneliti kurang terjaganya nilai estetika dalam wisata bahari Kabupaten Malang karang yang mulai rusak, lingkungan yang kotor, terdapat banyak cara menuju lokasi wisata bahari Kabupaten Malang. Bisa menggunakan mobil pribadi, motor, atau bus. Semisal menuju Pantai Balekambang dengan naik kendaraan umum, harus terlebih dahulu turun di Terminal Arjosari. Perjalanan dilanjutkan dengan naik angkutan kota jurusan Terminal Gadang. Setelah itu, cari kendaraan menuju Bantur, yang akan melaui Kecamatan Gondanglegi dan Pagelaran. Inilah pemberhentian terakhir angkutan umum. Kalian harus melanjutkan perjalanan dengan ojek untuk sampai pada lokasi wisata pantai balekambang.

Minimnya rambu lalin menuju obyek wisata menyebabkan wisatawan dari luar daerah kerap salah arah dan mengurungkan niat wisata. “Sekarang rambu lalin penunjuk ke tempat obyek wisata masih minim,” selaku pengunjung wisata bahari. Dari pemaparan yang telah tersaji diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Wisata Bahari Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”** (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang muncul ialah:

1. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengelola wisata bahari di Kabupaten Malang ?
2. Bagaimanakah kontribusi wisata bahari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemerintah dalam mengelola wisata bahari di Kabupaten Malang
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi wisata bahari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Sebagai salah satu bahan pengembangan keilmuan Administrasi Publik khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan lebih spesifik tentang upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi sektor pariwisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Kontribusi Praktis

Memberikan masukan, informasi, dan bahan pertimbangan kepada *stakeholder* terkait dalam pengembangan dan perencanaan pembangunan di kabupaten Malang khususnya di sektor pariwisata.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis mengemukakan secara garis besar teoritis yang menjadi dasar bagi penulis dalam memberikan alternative solusi atas segala permasalahan yang ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan metode analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas tentang data-data hasil penelitian yang tertuang dalam penyajian data serta analisa data untuk membahas permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian saran yang berguna dan bermanfaat sebagai tanggapan atas hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mempunyai dua pengertian menurut Siagian (1982:2) Adminitrasi Pembangunan adalah keseluruhan proses perencanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pekasanaan itu pada umunmnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sedangkan pengertian dalam pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan pengertian tersebut definisi tentang pembangunan mempunyai artian yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman seseorang. Selanjutnya Siagian (2001:4) menyatakan tujuh ide pokok pembangunan antara lain:

1. Pembangunan merupakan suatu proses.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.

5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multidimensional.
7. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Dengan demikian harus diakui bahwa peranan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sangatlah penting dan menentukan. Meskipun peran pemerintah itu sangat penting, maka seluruh unsur masyarakat harus turut dalam pembangunan seperti pengertian administrasi pembangunan. Menurut Siagian (1982:4). Administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas pengertian administrasi pembangunan jelas bahwa bangsa yang sedang membangun tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa bangsa itu bersikap acuh terhadap pembangunan. Menyerahkan kegiatan-kegiatan pembangunan itu hanya kepada pemerintah adalah suatu hal yang umum dan pada hakekatnya partisipasi seluruh masyarakat (*societal participation*) merupakan salah satu tugas kewajiban setiap masyarakat.

Masalah yang serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah lemahnya kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini, maka administrasi pembangunan yang berkembang di

negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup dan karakteristik dengan negara-negara yang telah maju. Dasar inilah Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi:

Pertama, penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi: upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut *the development of administration* (pembangunan administrasi), yang kemudian lebih dikenal dengan istilah “Administrative Reform” (reformasi administrasi).

Kedua, perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut *the administration of development* (Administrasi untuk pembangunan). Administrasi untuk pembangunan (*the development of administration*) dapat dibagi atas dua; yaitu; (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan, (b) pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif.

Ketiga, pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat. Seperti yang diuraikan di atas bahwa administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang cocok diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang, namun Bintoro Tjokroamidjojo membedakan bahwa administrasi pembangunan lebih banyak memberika perhatian terhadap lingkungan yang berbeda-beda, terutama

lingkungan masyarakat yang baru berkembang. Sedangkan administrasi pembangunan berperan aktif dan berkempentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, sedangkan dalam ilmu administrasi negara bersifat netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya yang mendorong perubahan-perubahan kearah ke keadaan yang lebih baik dan berorientasi mada depan, sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif/tertib, efisien pada masing-masing unit pemerintahan.

Administrasi pembangunan berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yaitu kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada tugas-tugas rutin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Administrasi pembangunan mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang, Ilmu administrasi negara lebih memperhatikan pada kerapihan/ketertiban aparatur administrasinya sendiri. Administrator pada administrasi pembangunan merupakan penggerak perubahan (*change agent*), sedangkan administrator pada administrasi pembangunan berorientasi pada lingkungan, kegiatan dan pemecahan masalah sedangkan pada administrasi negara lebih bersifat legalitas.

Tabel 1. Perbedaan Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan

No	Administrasi Negara	Administrasi Pembangunan
1.	Lebih banyak terkait dengan lingkungan masyarakat negara-negara maju.	Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi

No	Administrasi Negara	Administrasi Pembangunan
		lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.
2.	Terdapat kelompok yang cenderung berpendapat turut berperannya administrasi negara dalam proses perumusan kebijaksanaan, tapi peranan itu masih kurang ditekankan.	Mempunyai peran aktif, pengaruh (influence) & berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya.
3.	Lebih menekankan kepada pelaksanaan yang tertib/efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah pada waktu ini dan berorientasi masa kini.	Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa depan. Jadi berorientasi pada masa depan.
4.	Lebih menekankan kepada tugas-tugas umum (rutin) dalam rangka pelayanan masyarakat dan tertib pemerintahan. Administrasi Negara lebih bersikap sebagai “ <i>balancing agent</i> ”	Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai “ <i>development agent</i> ”
5.	Sebagai akibat dari hal yang disebutkan di atas, maka administrasi negara lebih menengok kepada kerapian aparatur administrasi itu sendiri.	Administrasi pembangunan merupakan administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
6.	Dalam administrasi negara seakan-akan ada kesan menempatkan administrator dalam aparatur pemerintah sekadar sebagai pelaksana.	Dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan.
7.	Lebih berpendekatan legalistik	Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah.

Sumber: (Tjokroamidjojo. 1995)

B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

1. Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan (Syamsuddin, 2007: 52). Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, Desentralisasi akhir – akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintah karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintah di Indonesia.

Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah – daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional, Menurut pendapat Josef Riwu Kaho (1997 : 12), tujuan desentralisasi adalah:

- a. mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan,
- b. dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat,
- c. dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan,

- d. dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah,
- e. mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat,
- f. dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung .

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). Rondinelli dalam syamsuddin (2007 : 4) menjelaskan bahwa devolusi adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang

berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah otonom didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi, digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007:29). Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

3. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,

peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (HAW. Widjaja, 2007:133).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya

telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Rozali Abdullah, 2007:5).

4. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Bratakusuma Deddy & Dadang Solihin (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

C. Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), merupakan suatu penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah mengenai urusan pemerintah berdasarkan asas dan prinsip otonomi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan mengenai pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah yang menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan kewenangan daerah otonom. Terdapat tiga asas tentang pemerintahan daerah dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yaitu, asas otonom, asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Berdasarkan Undang-undang tersebut pengertian Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dikepalai oleh Kepala Daerah dalam suatu daerah tertentu yang mendapatkan pelimpahan urusan pemerintahan dari pusat dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

D. Pariwisata

Pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah, mempunyai konsekuensi, memiliki wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian prakara sepenuhnya diberikan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi – segi pembiayaan dengan harapan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Negara – negara berkembang dan negara – negara yang sedang membangun, seperti Indonesia, membutuhkan banyak modal untuk pembangunannya, sehingga tambahan penerimaan dari pariwisata merupakan tambahan modal yang dapat dimanfaatkan untuk memperbesar produksi. Dasar dari negara dalam mengembangkan industri pariwisata ialah untuk meningkatkan penghasilan devisa negara. Selain itu jugabertujuan untuk memperoleh nilai – nilai ekonomi yang positif dan pariwisata diharapkan berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan perekonomian pada beberapa sektor (Yoeti,1997:23).

Demikian jelas, bahwa sektor pariwisata yang memiliki kekomplekan aktivitas sangatlah besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembangunan suatu bangsa. Pariwisata merupakan suatu bentuk ekspor yang dianggap menguntungkan, terutama bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Diperlukan pengelolaan yang sungguh – sungguh dari berbagai pihak yang terkait mulai dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, pihak swasta, serta

masyarakat. Menurut Karyono (1997:15), Pariwisata dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, bentuk umum pariwisata didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Kedua, ialah bentuk teknis pariwisata didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok didalam wilayah negara sendiri maupun negara lain.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang melakukan perjalanan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, akan tetapi kunjungan tersebut semata-mata untuk menikmati perjalanan guna memenuhi keinginan yang beraneka ragam, antara lain ingin melihat keindahan alam suatu daerah, peninggalan sejarah, ingin mengetahui seni dan budaya daerah tujuan. Dengan demikian jelas bahwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan wisata sangat ditentukan oleh keadaan masing-masing individu dan mereka juga mempunyai motivasi yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang kehidupannya.

1. Pariwisata Dalam Pembangunan

Dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan 1995, Pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara

mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai “resep” pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini :

a. Partisipasi

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

b. Keikutsertaan Para Pelaku

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi

bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

c. Kepemilikan Lokal

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran, dan sebagainya. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

d. Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber

daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

e. Mewadahi Tujuan – tujuan Masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

f. Daya Dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi.

g. Monitor dan Evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal.

h. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

i. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, *vocational*, dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.

j. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

2. Jenis jenis pariwisata

Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda – beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Termasuk didalamnya jenis pariwisata

daerah mempunyai ciri – ciri sendiri untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah masing – masing. Untuk keperluan perencanaan dan pengembangan dari jenis – jenis pariwisata tersebut harus dibedakan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan kebijakan apa yang dapat mendukung sektor pariwisata tersebut. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap fasilitas yang perlu dipersiapkan dalam pengembangan industri pariwisata tersebut. Sehingga nantinya mampu mendatangkan keuntungan yang lebih bagi daerah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah tersebut. Potensi – Potensi wisata yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dipengaruhi oleh letak geografis dari kawasan wisata tersebut (Pendit, 1994:67). Selain itu, Pendit (1994:34), juga mengklasifikasikan jenis pariwisata yang sudah dikelompokkan yaitu :

a. Wisata cagar alam

Jenis Wisata ini terkait dengan kegemaran akan keindahan alam, hawa udara yang segar di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh – tumbuhan yang jarang ditempat lain.

b. Wisata budaya

Tujuannya adalah ingin memperluas pandangan hidup dan kunjungan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan masyarakat setempat, kebiasaan dan adat – istiadat, cara hidup, budaya dan kesenian daerah.

c. Wisata pertanian

Mengandalkan perjalanan ke proyek – proyek pertanian, perkebunan, lading pembibitan, sambil menikmati segarnya aneka ragam tanaman.

d. Wisata bahari

Wisata yang dihubungkan dengan olahraga air atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam, selancar, melihat tanaman laut serta berbagai rekreasi perairan lainnya.

e. Wisata kesehatan

Keperluan beristirahat dalam arti jasmani dan rohani yang mengunjungi tempat peristirahatan, seperti air panas yang mengandung mineral, iklim yang sejuk dan menyehatkan.

f. Wisata komersial

Mengadakan perjalanan mengunjungi pameran – pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dengan dimeriahkan berbagai atraksi seni.

g. Pilgrim

Dikaitkan dengan agama, sejarah, adat dan kepercayaan umat atau kelompok masyarakat dengan cara mengunjungi tempat suci, makam orang besar, pemimpin yang diagungkan, tempat penuh legenda, bukit atau gunung yang dianggap kramat.

Sedangkan jenis – jenis pariwisata menurut Ndrahu (1983:7), digolongkan menjadi 2 bagian yaitu :

a. Ketinggian nilai budaya

Berupa keindahan kesenian seperti seni ukir kayu, kulit maupun logam, seni batik dan songket, seni tari, seni musik tradisional yang semuanya tiap daerah beranekaragam coraknya. Selain itu juga didapat berwujud peninggalan sejarah berupa candi – candi, pura maupun keratin seta

warisan adat – istiadat maupun seni kehidupan asli setempat yang berbeda – beda.

b. Keindahan alam

Berupa deburan ombak, pasir putih, karang laut, tanah laut, perumahan berundak – undak, gunung berapi, sumber air panas, air terjun dan macam – macam makanan khas daerah. Kekayaan alam dan keindahan alam yang dimiliki berbagai daerah di Indonesia seperti yang digambarkan diatas sangat menarik minat bagi para calon wisatawan baik asing maupun domestik untuk mengunjungi ke daerah – daerah tujuan wisata tersebut, sehingga apabila itu dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata

3. Objek Dan Daya Tarik Wisata

Adanya obyek dan daya tarik wisata menjadi alasan utama bagi para wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Suswantoro yang menyebutkan bahwa : “Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata” (Suswantoro, 1997:19).

Pada obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan suatu kegiatan pengusaha. Dalam segi pengusahaannya, Muljadi, (2009 : 57-59) mengelompokan Obyek dan Daya Tarik Wisata ke dalam 3 macam :

a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam

Pengusahaan ini merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam dapat pula disertakan dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang bersangkutan.

b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pengusahaan ini merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai obyek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata.

c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Pengusahaan ini merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus.

4. Sarana dan Prasarana Wisata

Sarana merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sarana Wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif menunjuk pada mutu pelayanan yang diberikan dan tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan.

Penyediaan sarana kepariwisataan ini dapat disediakan oleh perusahaan – perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata. Hal ini didukung oleh pendapat Muljadi (2009:13) yang menyebutkan bahwa sarana kepariwisataan sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan keberlangsungan hidupnya tergantung dari wisatawan yang berkumjung.

Terdapat berbagai unsur penting dalam menyediakan sarana wisata seperti yang dikemukakan Suswanto (1997:18) yang membagi sarana wisata ke dalam tiga unsur penting, yaitu :

- a. Sarana Pokok Kepariwisata (*main tourism superstructure*), yang terdiri dari:
 - 1) Biro perjalanan umum dan agen perjalanan
 - 2) Transportasi wisata baik darat, laut, dan udara
 - 3) Retorant
 - 4) Obyek wisata, antara lain :
 - a) Keindahan alam (*natural amenities*), pemandangan, fauna dan flora yang aneh (*uncommon vegetation & animals*), hutan, dan sumber kesehatan (*health center*) seperti sumber air panas belerang, mandi lumpur, dan lain –lain.
 - b) Ciptaan manusia (*man made supply*) seperti monumen-monumen, candi-candi, galeri seni, dan lain-lain
- 5) Atraksi Wisata (*tourist attraction*)

Ciptaan manusia seperti kesenian, festival, pesta, ritual, upacara perkawinan tradisional, khitanan, dan lain-lain.

b. Sarana Pelengkap Kepariwisata (supplementing tourism superstructure)

- 1) Fasilitas, rekreasi dan olahraga, seperti lapangan tenis, pemandian, kuda tunggangan, fotografi, dan lain-lain.
- 2) Prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, listrik, lapangan udara, telekomunikasi, air bersih, pelabuhan dan lain – lain.

c. Sarana Penunjang Kepariwisata (supporting tourism superstructure)

- 1) *Night club* dan *steambath*
- 2) *Casino* dan *entertainment*
- 3) *Souvenir Shop*, *mailing service*, dan lain-lain

Sedangkan yang dimaksud prasarana pariwisata menurut Muljadi, (2009:13) Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang mendukung agar sarana pariwisata dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan guna memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Prasarana kepariwisataan yang dimaksud antara lain: (a) Prasarana perhubungan seperti, jaringan jalan raya dan rel kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat dan stasiun kereta api, (b) Instalasi tenaga listrik dan penjernian air bersih, (c) Sistem pengairan untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan perkebunan, (d) Sistem perbankan dan moneter, (e) Sistem telekomunikasi

seperti, telepon, internet, pos, televisi dan radio (f) Pelayanan kesehatan dan keamanan.

5. Pengembangan Pariwisata

Kata Pengembangan berasal dari kata dasar “kembang”, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan menjadi besar, luas, banyak atau menjadi bertambah sempurna. Sedangkan kata pengembangan berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan. Definisi lain pengembangan menurut Yoeti (1997:273) adalah Pengembangan adalah usaha/cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Sedangkan menurut Chalik (1996:85) pengembangan adalah Perubahan atau peningkatan yang telah ada kepada tingkat yang lebih baik dan lebih sempurna sebagaimana yang telah direncanakan.

Pengembangan dalam konteks pariwisata dimaksudkan untuk melakukan suatu peningkatan atau kemajuan terhadap sektor pariwisata. Seperti yang diungkapkan Sumardjan dalam Spillane mengatakan bahwa:

“ Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi fisik dan sosial dari suatu Negara. Disamping itu, rencana kerja tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata”. (Spillane, 1987:133)

Mengacu pada pendapat di atas, maka pengembangan pariwisata dapat dimaksudkan sebagai usaha pengembangan melalui suatu rencana

yang terprogram dan terintegrasi dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan agar berkunjung ke daerah tujuan wisata.

Pengembangan suatu produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan dan menambah jenis produk yang dihasilkan atau pun yang akan dipasarkan (Yoeti, 1996:53).

Dalam pengembangan suatu daerah untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata, agar menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan potensial dalam berbagai pasar, maka harus memiliki tiga syarat (Yoeti, 1996: 177), yaitu:

- a. Daerah tersebut harus mempunyai apa yang disebut sebagai “*something to see*”. Artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain.
- b. Daerah tersebut harus tersedia dengan apa yang disebut sebagai “*something to do*”. Artinya di tempat tersebut setiap banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu.
- c. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut sebagai “*something to buy*”. Artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (*shopping*), terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal wisatawan.

Ketiga syarat tersebut sejalan dengan pola tujuan pemasaran pariwisata, yaitu dengan promosi yang dilakukan sebenarnya hendak mencapai sasaran agar lebih banyak wisatawan datang pada suatu daerah, lebih lama tinggal dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat yang mereka kunjungi.

Tahapan pengembangan merupakan tahapan siklus evolusi yang terjadi dalam pengembangan pariwisata, sejak suatu daerah tujuan wisata baru ditemukan (*discovery*), kemudian berkembang dan pada akhirnya terjadi penurunan (*decline*). Menurut Butler (dalam Pitana, 2005: 103) ada 7 fase pengembangan pariwisata atau siklus hidup area pariwisata (*Destination Area Life Cycle*) yang membawa implikasi serta dampak yang berbeda, secara teoritis diantaranya:

- a) Fase *exploration* (eksplorasi/penemuan). Daerah pariwisata baru mulai ditemukan, dan dikunjungi secara terbatas dan sporadis, khususnya bagi wisatawan petualang. Pada tahap ini terjadi kontak yang tinggi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, karena wisatawan menggunakan fasilitas lokal yang tersedia. Karena jumlah yang terbatas dan frekuensi yang jarang, maka dampak sosial budaya ekonomi pada tahap ini masih sangat kecil.
- b) Fase *involvement* (keterlibatan). Dengan meningkatnya jumlah kunjungan, maka sebagian masyarakat lokal mulai menyediakan berbagai fasilitas yang memang khusus diperuntukan bagi wisatawan. Kontak antara wisatawan dengan masyarakat dengan masyarakat

lokal masih tinggi, dan masyarakat mulai mengubah pola-pola sosial yang ada untuk merespon perubahan ekonomi yang terjadi. Disinilah mulainya suatu daerah menjadi suatu destinasi wisata, yang ditandai oleh mulai adanya promosi.

- c) Fase *development* (Pembangunan). Investasi dari luar mulai masuk, serta mulai munculnya pasar wisata secara sistematis. Daerah semakin terbuka secara fisik, dan promosi semakin intensif, fasilitas lokal sudah tesusih atau digantikan oleh fasilitas yang benar-benar berstandar internasional, dan atraksi buatan sudah mulai dikembangkan, menambahkan atraksi yang asli alami. Berbagai barang dan jasa impor termasuk tenaga kerja asing, untuk mendukung perkembangan pariwisata yang pesat.
- d) Fase *consolidation* (konsolidasi). Pariwisata sudah dominan dalam struktur ekonomi daerah, dan dominasi ekonomi ini dipegang oleh jaringan internasional atau *major chains and franchises*. Jumlah kunjungan wisatawan masih naik, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Pemasaran semakin gencar dan diperluas untuk mengisi fasilitas yang sudah dibangun. Fasilitas lama sudah mulai ditinggalkan.
- e) Fase *stagnation* (kestabilan). Kapasitas berbagai faktor sudah terlampaui di atas daya dukung, sehingga menimbulkan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Kalangan industri sudah mulai bekerja keras untuk memenuhi kapasitas dari fasilitas yang dimiliki,

- khususnya dengan mengharapkan *repeater guest* dan wisata konvensi/bisnis. Pada fase ini, atraksi buatan sudah mendominasi atraksi asli alami (baik budaya maupun alam), citra awal sudah mulai luntur, dan destinasi sudah tidak lagi populer.
- f) Fase *decline* (penurunan). Wisatawan sudah mulai beralih ke destinasi wisata baru atau pesaing, dan yang tinggal hanya 'sisa-sisa', khususnya wisatawan yang hanya berakhir pekan. Banyak fasilitas pariwisata sudah beralih atau dialihkan fungsinya untuk kegiatan non-pariwisata, sehingga destinasi semakin tidak menarik bagi wisatawan. Partisipasi lokal mungkin meningkat lagi, terkait dengan harga yang merosot turun dengan melemahnya pasar. Destinasi bisa berkembang menjadi destinasi kelas rendah atau secara total kehilangan jati diri sebagai destinasi wisata.
- g) Fase *rejuvenation* (Peremajaan). Perubahan secara dramatis bisa terjadi (sebagai hasil dari berbagai usaha dari berbagai pihak), menuju perbaikan atau peremajaan. Peremajaan ini bisa terjadi karena inovasi dan pengembangan produk baru, atau menggali atau memanfaatkan sumber daya alam dan budaya yang sebelumnya.

6. Upaya pengembangan pariwisata

Penyelenggaraan pengembangan pariwisata Indonesia dimaksudkan agar daya tarik wisata yang banyak dimiliki bangsa Indonesia dapat dikenal, baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia, serta dapat didayagunakan secara optimal, dengan tetap

menjaga keutuhan dan keaslian, serta menghindarkan dari kerusakan. Dalam melakukan pengembangan pariwisata diperlukan adanya suatu strategi pengembangan kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai produk dan pelayanan pariwisata yang berkualitas. Berikut adalah langkah pokok strategis pengembangan kepariwisataan nasional seperti yang disebutkan oleh Suswantoro (1997:55) :

- a. Dalam jangka pendek dititik beratkan pada optimasi, terutama untuk:
 - 1) Mempertajam dan memantapkan citra kepariwisataan
 - 2) Meningkatkan mutu tenaga kerja
 - 3) Meningkatkan kemampuan pengelolaan
 - 4) Memanfaatkan produk yang ada
 - 5) Memperbesar saham dari pasae pariwisata yang telah ada
- b. Dalam jangka menengah dititik beratkan pada konsolidasi, terutama dalam:
 - 1) Memantapkan citra kepariwisataan Indonesia
 - 2) Mengkonsolidasikan kemampuan pengelolaan
 - 3) Mengembangkan dan diversifikasi produk
 - 4) Mengembangkan jumlah dan mutu tenaga kerja
- c. Dalam jangka panjang dititik beratkan pada pengembangan dan penyebaran dalam:
 - 1) Pengembangan kemampuan pengelolaan
 - 2) Pengembangan dan penyebaran produk dan pelayanan
 - 3) Pengembangan pasar pariwisata baru
 - 4) Pengembangan mutu dan jumlah tenaga kerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sektor kepariwisataan antara lain melalui jalan sebagai berikut dalam buku perencanaan tahun kunjungan wisata Indonesia (*Visit Indonesia Year* 1991).

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas di objek wisata.

Kuantitas dan Kualitas prasarana Pariwisata Yang terdiri atas Jalan, Listrik, Air, Telekomunikasi, Pelayanan Kesehatan , Terminal/ pelabuhan. Jumlah dan Kualitas Sarana Pariwisata yang terdiri Perusahaan- Perusahaan Angkutan Wisata, Hotel atau Jenis Akomodasi lainnya, Restoran atau Rumah. Makan Lainnya dan Sarana Olahraga.

Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjual makanan, warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (pramuniaga, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain), selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko perabot rumah tangga, dll), lalu jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi dan pemadam kebakaran).

b. Menjaga keasrian dan kelestarian objek wisata.

Cara-cara menjaga keasrian objek wisata dalam negeri seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-mencoret tembok, melakukan penghijauan disekitar pegunungan, tidak membuang sampah ke sungai yang nantinya bermuara ke laut, melestarikan terumbu karang, dan sebagainya

- c. Menjaga keamanan dan kenyamanan objek wisata, agar para wisatawan merasa betah dan aman selama tinggal di daerah objek wisata. Suatu ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan sangat berarti bagi setiap wisatawan karena mereka mencari kepuasan berwisata bukan mencari masalah dalam berwisata. Keamanan dan kenyamanan sangatlah penting alasan tersebut karena jika objek wisata tidak aman dan nyaman dapat merugikan wisatawan itu sendiri baik fisik maupun finansial. Faktor-faktor yang memengaruhi kenyamanan dan kewanitaan yaitu faktor lingkungan, faktor kegiatan ekonomi dan faktor akses jalan pariwisata. Pertama, faktor lingkungan berdasarkan hasil penelitian terdapat dua aspek yang memiliki pengaruh terhadap ketidak-nyamanan dan ketidak-aman wisatawan yaitu pengelolaan areal parkir dan kebersihan lingkungan. Pengelolaan tempat parkir di kawasan pariwisata masih belum jelas, walaupun diketahui bahwa penjagaan dan pemungutan biaya parkir dilakukan oleh pihak satpam pantai. Pengelolaan tempat parkir dan besaran biaya parkir sering membuat pengunjung merasa tidak nyaman.

- d. Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan untuk mencetak tenaga terdidik dan terlatih dalam bidang pariwisata.

Pembangunan wisata kota mestinya memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil, dan menengah. Program pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus mengutamakan penduduk lokal dan industri yang berkembang pada wilayah tersebut harus mampu menampung para pekerja lokal sebanyak mungkin.

- e. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang memperlancar perjalanan menuju objek wisata.

Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Termasuk prasarana pariwisata meliputi: jalan raya, jembatan dan terminal bus, rel kereta api dan stasiun, pelabuhan udara (*air-port*) dan pelabuhan laut (*sea port/harbour*). Sarana Pariwisata adalah fasilitas dan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maju mundurnya sarana kepariwisataan tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan.

- f. Meningkatkan kualitas cinderamata yang akan dibeli oleh para wisatawan.

Ada empat alasan para wisatawan membeli cinderamata. Pertama karena produknya menarik, unik, dan merupakan ikon DTW; Kedua, kualitas atau mutu; Ketiga, packaging-nya bagus menarik; Keempat, harga. Dengan mengetahui alasan itu, pengrajin hendaknya menekankan pada pentingnya keunikan dan kualitas produk mengingat wisatawan menekankan pada wujud produk. Wisatawan cenderung tidak terlalu peduli dengan harga, tapi lebih mementingkan kualitas dan keunikan produk. Hal lain yang tak kalah penting diperhatikan adalah produk tersebut mudah dibawa, tidak berat, kemasan yang bagus, dan kualitas yang bagus. Peluang menarik bagi pengusaha UKM yang berkuat dengan cinderamata adalah menerobos pasar ekspor. Untuk mencapai hal itu diperlukan inovasi produk kerajinan.

g. Memasyarakatkan program Sapta Pesona

Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di Negara kita. Sapta Pesona terdiri dari tujuh unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan. Kita harus menciptakan suasana indah dan mempesona, dimana saja dan kapan saja. Khususnya ditempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan dan pada waktu melayani wisatawan. Dengan kondisi dan suasana yang menarik dan nyaman, wisatawan akan betah tinggal

lebih lama, merasa puas atas kunjungannya dan memberikan kenangan indah dalam hidupnya.

E. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3 tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain – lain penerimaan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud dalam Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber - sumber dalam wilayahnya sendiri yang pengambilannya didasarkan atas perundang - undangan yang berlaku dalam kerangka Peraturan Daerah.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah, prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) relative kecil. Pada umumnya APBD satu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan - sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang - undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat bergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari suatu daerah bukanlah disebabkan karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber – sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini

sumber - sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pemerintah pusat (Rozali, 2000:47)

Sebagai indikator dalam mengetahui kemampuan daerah atas keuangan yang dimiliki untuk memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam semua kebijakan – kebijakan yang diambil. Prioritas atas kebijakan keuangan daerah khususnya pada PAD – nya dapat dilihat pada pernyataan dari Kristiadi (1991:47), tentang kebijakan yang mendukung Keuangan Daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah seyogyanya lebih dititik beratkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi karena berkaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang akan diarahkan pada kemampuan pelayanan yang lebih dapat memuaskan publik atau masyarakat.
2. Dan dari sektor pajak seharusnya dapat dilakukan dengan memberikan perhatian pada obyek – obyek yang potensial, yang memberikan hasil banyak. Dan penghapusan atas obyek pajak yang hanya memberi beban banyak dalam pemungutan.

Dengan demikian untuk mencapai Otonomi Daerah, seperti yang diharapkan oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 harus dilakukan beberapa hal yang sangat erat hubungannya dengan bagaimana daerah sendiri memenuhi semua kebutuhan akan keuangannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendominasi APBD – nya sebagaimana wujud Otonomi Keuangan Daerah.

Jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang sumber - sumber pendapatannya berasal dari penggalian atau pungutan daerah dan ini sangat ditentukan oleh potensi daerah dan keintensifan aparat pemungut serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1. Upaya PAD Dalam Bidang Pariwisata

Selain sebagai fungsi pokok pemerintah daerah mempunyai peranan sebagai *development agent* atau sebagai unsur pembaru dan pendorong pembangunan dan pengembangan kepariwisataan serta pembangunan nasional pada umumnya. Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling menonjol memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dari itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan pada sektor ini karena laju pertambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama berasal dari banyaknya wisatawan yang datang ke daerah tujuan wisata tersebut. Untuk mengundang wisatawan agar datang ke tempat tujuan wisata maka perlu adanya promosi serta pembangunan sarana dan prasarana, di samping itu juga memperhatikan lingkungan alam sekitar, atau dengan kata lain pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan.

2. Sumber – Sumber PAD yang Berhubungan dengan Pariwisata

a. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2006:12) yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan dan pembangunan daerah tersebut.

Dari pengertian di atas, maka pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan di daerah berdasarkan hasil pemungutannya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan – urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. Pajak daerah yang ada hubungannya dengan sektor pariwisata adalah:

1) Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Adapun yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton aatau dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga.

Besarnya tarif pajak hiburan adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atas jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan.

2) Pajak Hotel dan Restoran

Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang – orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan memungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa catering.

Adapun subyek pajak yang menanggung pajak hotel dan restoran berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2009 adalah pengusaha rumah makan restoran atau penginapan (hotel) tersebut dikenakan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel atau restoran.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ichsan dan Ratih (1989:34), menyatakan retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan hukum yang telah menikmati jasa dan barang pemerintah. Dari pengertian tersebut jelas bahwa retribusi daerah adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau adanya prestasi langsung yang dapat diterima oleh wajib bayar, sedangkan yang menjadi obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya namun hanya jenis – jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonominya layak untuk dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan tertentu.

Retribusi daerah yang berhubungan dengan sektor pariwisata antara lain:

- 1) Retribusi penggunaan tempat rekreasi obyek wisata, taman yang dikuasai oleh Pemerintah
- 2) Retribusi parkir di lokasi obyek wisata
- 3) Hasil Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk guna mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penerimaan daerah. Menurut alasan pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah adalah atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Menjalankan ideologi yang dianut bahwa sarana produksi milik masyarakat
- 2) Melindungi konsumen dalam hal monopoli alami
- 3) Mengambil ahli perusahaan asing
- 4) Menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah
- 5) Menghasilkan penerimaan untuk daerah

Berdasarkan alasan – alasan tersebut pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah sebagai salah satu alternatif bagi pemasukan pendapatan daerah. Adapun hasil perusahaan daerah yang berhubungan dengan sektor pariwisata adalah hasil yang diperoleh oleh perusahaan daerah yang mengelolah obyek tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Setiap penelitian selalu menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian, sehingga data dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Menurut Hillway dalam Nazir (2002:14), penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang berhati-hati terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh suatu pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Berdasarkan judul, rumusan masalah, tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2014:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mendeskripsikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut tentang Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Wisata Andalan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2005: 93), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus penelitian. Fokus penelitian untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan tidak relevan. Fokus penelitian memiliki batasan dalam studi dan dalam pengumpulan data sehingga peneliti akan lebih fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menentukan fokus penelitian pada Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Wisata Andalan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang. Fokus penelitian diuraikan dalam beberapa aspek sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah daerah dalam mengelola wisata bahari guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang, yang meliputi :
 - a. Kuantitas dan kualitas fasilitas di objek wisata
 - b. Keamanan dan kenyamanan objek wisata
 - c. Keasrian objek wisata
 - d. Sarana dan prasarana transportasi menuju objek wisata

- e. Kualitas cinderamata untuk wisatawan
- 2. Kontribusi wisata bahari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang pada tahun 2014 – 2016.
 - a. Retribusi objek wisata
 - b. Pajak hotel dan restoran
 - c. Pajak hiburan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah Kabupaten Malang, karena Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang banyak memiliki potensi wisata andalan menjanjikan untuk dikelola dan dikembangkan.

2. Situs Penelitian

Situs Penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini situs penelitian berada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Beberapa pertimbangan peneliti mengambil situs penelitian tersebut diantaranya adalah:

- a. Kabupaten Malang memiliki potensi pariwisata yang belum dikembangkan dan dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah.
- b. Kabupaten Malang memiliki potensi sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata yang di dapat dari berbagai sumber di sektor pariwisata

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan hasil dari menggabungkan kata-kata dan tindakan, serta informasi-informasi yang dapat membantu penelitian tersebut, karena sumber-sumber tersebut merupakan sumber data utama bagi penelitian kualitatif, hal ini disampaikan oleh Lofland yang dikutip oleh Moleong (2002:157). Oleh karena itu maka peneliti membagi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan, peneliti dalam menentukan informan awal melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian peneliti memilih informan secara purposive, pada subyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti "*key informan*". Kemudian untuk mendapatkan informan selanjutnya, peneliti meminta kepada informan awal untuk menentukan siapa aktor selanjutnya yang kompeten dan bisa memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Cara seperti ini dikenal dengan istilah "*snowball*" yang dilakukan secara sejalan atau berurutan sampai penelitimenapai titik jenuh. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informasi
2. Dokumen, yakni teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan atau kebijakan-kebijakan yang lainnya yang berkaitan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola wisata bahari. Selain itu peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian. Teknik ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi informasi peneliti dan untuk mendapatkan data yang akurat.

3. Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola wisata bahari

Sementara itu, berdasarkan jenis penelitian ini, pada dasarnya terdapat dua klasifikasi data yaitu :

1. Data Primer: Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan cara mengamati, mencatat dan mewawancarai langsung dengan pihak yang berkaitan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola wisata bahari. Dengan demikian, untuk menjadi informasi yang diperlukandalam penelitian ini masih membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut. Sementara itu, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan:
 - a. Bapak Yasdi selaku Kepala Unit Balekambang
 - b. Bapak Sodik selaku Kepala Unit Ngliyep
 - c. Bapak Made selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - d. Bapak Kasni selaku pelaku usaha di Ngliyep
 - e. Bu Yunani selaku pengunjung pantai
 - f. Bapak Bukhori selaku tentara keamanan di wilayah pesisir
2. Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang di dapat oleh peneliti dengan dari bantuan orang lain atau hasil kerja orang lain. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk dokumen, laporan, catatan, maupun arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian.
 - a. Data pariwisata Kabupaten Malang
 - b. Profil daerah
 - c. Lakip tahun 2015

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya kegiatan pengumpulan data maka data yang diperlukan tidak akan bisa diperoleh. Teknik pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Informan

Informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya:

- a. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti.
- b. Informan non kunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

2. Peristiwa

Peristiwa, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara jelas terhadap fenomena-fenomena ataupun fakta-fakta yang ditemui yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dan menyalin dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya. Dokumen yang dipelajari adalah dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan fokus

penelitian. Fungsi dokumentasi ini adalah untuk mendukung data hasil wawancara dan observasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan ketika peneliti pada proses pengumpulan informasi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memerlukan alat bantu untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian yang berjudul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Wisata Andalan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

1. Peneliti sendiri, Peneliti mengamati fenomena - fenomena dan melakukan wawancara dengan kelompok sasaran yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), Pedoman wawancara berupa materi-materi atau poin-poin yang menjadi acuan dan dasar dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Keberadaan pedoman wawancara tersebut dimaksudkan agar wawancara yang dilakukan benar-benar memperoleh informasi yang dibutuhkan dan yang dilakukan benar-benar memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan topik penelitian yang telah ditetapkan.
3. Catatan lapangan (*field trip*), Catatan lapangan berfungsi untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian. Peneliti melakukan pencatatan dengan menggunakan notebook sehingga mempermudah untuk mengingatkan peneliti dalam mengolah hasil wawancara.

4. Instrumen penelitian lainnya. Instrumen penelitian lainnya tersebut seperti: buku-buku, catatan, alat tulis dan alat perekam.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Malang terletak pada 112°03'50" sampai 112°57'00" Bujur Timur 7044'55" sampai 8026'35" Lintang Selatan. Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kepanjen ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang yang baru. Kota Kepanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan di utara, Kabupaten Lumajang di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur. Kabupaten Malang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

- 1) Utara : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto,
- 2) Timur : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang,
- 3) Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri,
- 4) Selatan: Samudra Indonesia



Sumber: malangkab.co.id

Gambar 2. Peta Kabupaten Malang

Mengacu pada badan pusat statistik kabupaten malang luas wilayah menurut kecamatan, tahun 2015 jumlah kecamatan yang terdapat di kabupaten malang berjumlah 33 kecamatan yang menempati wilayah seluas 2977,05 km² dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Luas wilayah menurut kecamatan, tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Prosentase
1	Donomulyo	192,20	6,47
2	Kalipare	105,39	3,54
3	Pagak	90,08	3,03
4	Bantur	159,15	5,35
5	Gedangan	130,55	4,39
6	Sumbermanjing	239,49	8,04
7	Dampit	135,31	4,55
8	Tirtoyudo	141,96	4,77
9	Ampelgading	79,60	2,67
10	Poncokusumo	102,99	3,46
11	Wajak	94,56	3,18
12	Turen	63,90	2,15
13	Bululawang	49,36	1,66
14	Gondanglegi	79,74	2,68
15	Pagelaran	45,83	1,54
16	Kepanjen	46,25	1,55
17	Sumberpucung	35,90	1,21
18	Kromengan	38,63	1,30
19	Ngajum	60,12	2,02
20	Wonosari	48,53	1,63
21	Wagir	75,43	2,53
22	Pakisaji	38,41	1,29
23	Tajinan	40,11	1,35
24	Tumpang	72,09	2,42
25	Pakis	53,62	1,80
26	Jabung	135,89	4,56
27	Lawang	68,23	2,29
28	Singosari	118,51	3,98
29	Karangploso	58,74	1,97
30	Dau	41,96	1,41
31	Pujon	130,75	4,39
32	Ngantang	147,70	4,96
33	Kasembon	55,67	1,87
	JUMLAH	2 977,05	100,00

Suber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan kawasan dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk.

Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa dan terpanjang di Jawa Timur.

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

b. Aspek Demografi

Tabel 3. Perkembangan Pendudukan Tahun 2006 - 2010

Uraian	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
Luas Wilayah	Km ²	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
Jumlah Penduduk	Jiwa	2.419.822	2.401.624	2.413.779	2.419.887	2.443.609
Jumlah Laki-laki	Jiwa	1.218.739	1.221.001	1.227.297	1.230.461	1.233.691
Jumlah Perempuan	Jiwa	1.201.083	1.180.623	1.186.482	1.189.426	1.191.309
Pertumbuhan Penduduk	%	1,08	-0,75	0,51	0,25	0,21
Kepadatan Penduduk	Jiwa / km ²	688	679	683	685	686

Sumber : BPS kab. Malang, 2010

Tabel 4. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Wilayah	Km ²	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
Jumlah Penduduk -BPS	Jiwa	2.463.158	2.482.863	2.502.726	2.522.748	2.542.930
- Dispenduk	Jiwa	2.789.336	2.817.229	2.845.402	2.873.856	2.899.805
Kepadatan -BPS	Jiwa/Km ²	697	702	708	714	719
- Dispenduk	Jiwa/Km ²	789	797	805	813	821

Sumber : (BPS. 2015)

c. Visi Misi Kabupaten Malang

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan untuk periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB”

Penjelasan visi :

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

- 1) Mandiri, yang dimaknai dengan pertama : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. Kedua: Kemandirian Masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership di kalangan pemerintahan dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.

- 2) Agamis, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
- 3) Demokratis, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.
- 4) Produktif, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.
- 5) Maju, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.
- 6) Aman, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang

berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

- 7) Tertib, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
- 8) Berdaya Saing, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya.
- 2) Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.
- 3) Mewujudkan supremasi hukum dan HAM.
- 4) Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai.

- 5) Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
- 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
- 7) Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
- 8) Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

2. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

a. Sejarah Disbudpar

Sejarah terbentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Pada tahun 1989 sampai dengan 1996 waktu itu masih berstatus **Cabang Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Malang** yang berkantor di Jalan Kawi 41 Malang menjadi satu dengan komplek Gedung APDN Malang, Kepala Cabang Dinas Pariwisata saat itu dipimpin oleh Bapak SUNARDI (almarhum)

Pada tahun 1996 sampai dengan 2004 terjadi perubahan dari Cabang Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Malang menjadi **Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Malang** dengan alamat kantor Jalan Gede No. 6 Malang yang dipimpin oleh Kepala Dinas :

- 1) Sunardi pada tahun 1996 sampai dengan 1999
- 2) Dra. Harsiari pada tahun 1999 sampai dengan 2001
- 3) Drs. Nuryanto, MM pada tahun 2001 sampai dengan 2004

Pada tahun 2004 sampai 2008 terjadi perubahan lagi sesuai dengan Peraturan Bupati Malang dengan Nomor: 90 Tahun 2004 dari Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Malang menjadi **Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang** dengan alamat kantor Jalan KH. Agus Salim No. 7 Malang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang yaitu Bapak PURNADI, SH. MSi.

Sedangkan pada tahun 2008 sampai 2013 terjadi perubahan lagi sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor: 11 Tahun 2008 dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang menjadi **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang** yang berkantor di Jalan Raya Singosari No. 275 Singosari – Malang dan dipimpin oleh Kepala Dinas:

- 1) Bapak Purnadi, SH. MSi. pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010
- 2) Ibu Ratna Nurhayati, MSi. pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

Setelah Ibu RATNA NURHAYATI, MSi. Menjabat sebagai Kepala Dinas pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 digantikan oleh Bapak Made Arya Wedanthara, SH, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Malang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas :
 - a) Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
 - b) Perencanaan strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - c) Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 - d) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 - e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata

- f) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- g) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- h) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- i) Pembinaan UPTD
- j) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- k) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang seni budaya dan pariwisata
- l) Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata;
- m) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya
- n) Peningkatan pengembangan apresiasi seni budaya;
- o) Pembinaan pengembangan obyek wisata, pentas seni budaya, rekreasi dan aneka hiburan.



Sumber: Penulis: 2017

Gambar 3. DISPARBUD Kab. Malang

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a) memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perumusan, perencanaan, kebijakan, pelaksanaa teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kebudayaan dan pariwisata serta menyelenggarakan perijinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Dalam menjalankan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pengelola urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan.

b) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi ;

1. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
2. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
3. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. penyelenggara pengelola administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
5. penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, pengadaan, kearsipan;
6. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan;
7. pengkoordinasian Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dan masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketetalaksanaan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, pendistribusian;
 - d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
 - f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
 - g. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - h. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
 - i. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan anggaran;
 - c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
 - g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- b. menyiapkan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata tingkat daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Kebudayaan dan pariwisata;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektoral;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

c. Visi Misi

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan salah satu pelaku pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata daerah merumuskan Visi sebagai berikut “ TERWUJUDNYA KEPARIWISATAAN KABUPATEN MALANG YANG BERBASIS MASYARAKAT “

Misi selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut guna memberikan arah dan tujuan ingin dicapai, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- 1) Membangun jati diri dan citra kepariwisataan Kabupaten Malang yang berbasis masyarakat;
- 2) Mendorong perkembangan kepariwisataan Kabupaten Malang yang berkualitas dan memiliki daya saing melalui :

- a) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang berdasarkan kearifan lokal;
 - b) Membangun sarana dan prasarana dalam keselarasan dan keharmonisan lingkungan;
 - c) Mewujudkan kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat;
 - d) Mengoptimalkan sarana informasi dan menyelenggarakan promosi yang lebih berkualitas;
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat

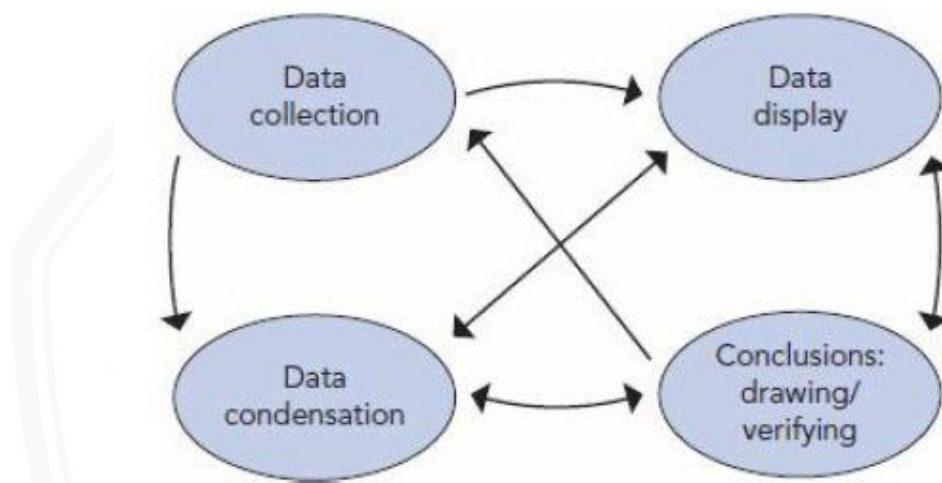
F. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam proses penelitian. Analisa data dalam sebuah penelitian merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, dengan memilih data kemudian membuat kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:246).

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dan dilakukan analisa secara terus menerus sampai tuntas. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang telah di tulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya (Moleong, 2006:247). Data yang diperoleh pada umumnya bersifat data kualitatif. Salah

satu fitur utama dari data kualitatif adalah bahwa mereka berfokus pada hal yang bersifat alami atau kejadian nyata.

Dalam analisis data kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang dilakukan dalam analisis data. Berikut adalah alur kegiatan yang dilakukan dalam analisis data:



Sumber :Buku *Qualitative Data Analysis* (Miles, Huberman, dan Saldana,2014)

Gambar 1: Analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldana

1. *Data Condensation* / Data Kondensasi

Kondensasi data merupakan suatu proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang dikumpulkan dari pencatatan di lapangan, transkrip, dokumen, wawancara dan bahan-bahan empiris lainnya. Kondensasi data dapat dilakukan meskipun data belum dapat dikumpulkan secara keseluruhan. Kondensasi data dapat dilakukan dengan cara yakni data yang telah dikumpulkan di lapangan dimasukkan dalam laporan maupun uraian secara lengkap dan rinci. Selanjutnya

laporan lapangan dibuat sederhana, dirangkum, dipilih intinya, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema, pola atau kesimpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi. Selama penelitian berlangsung kondensasi data terus dilakukan dan juga pada tahap analisis data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan.

2. *Data Display* / Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah kondensasi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang terorganisir, matriks, grafik, bagan alur, hubungan antar pola dan sejenisnya. Bentuk yang paling umum digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif ialah uraian bersifat naratif dan matriks. Fungsi dari Penyajian data ialah untuk mempermudah memahami data, untuk membantu dalam merencanakan tindakan selanjutnya.

3. *Drawing and Verifying Conclusions* / Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah diperoleh dan terkumpul, untuk kemudian diproses sehingga menjadi kesimpulan awal dan bersifat sementara. Apabila dalam tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung kesimpulan awal, maka kesimpulan awal akan berubah. Namun apabila pada tahap pengumpulan data selanjutnya ditemukan bukti-bukti yang kuat, valid, dan

konsisten mendukung kesimpulan awal, maka kesimpulan awal merupakan kesimpulan yang kredibel



B. Penyajian Data

1. Upaya pemerintah daerah dalam mengelola wisata bahari guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang

Tabel 5. Upaya Pemerintah

No	Bidang	Upaya Pemerintah
1.	Fasilitas	a) perbaikan mutu layanan b) perluasan area parkir c) penambahan tempat bermalam serta bale tempat istirahat yang diperuntukkan bagi wisatawan d) penambahan penerangan di area dalam lokasi wisata e) penambahan sejumlah spot spot selfi guna menarik wisatawan f) penambahan tempat bermain untuk anak anak g) penyediaan ambulance yang siaga selama 24 jam h) penyediaan klinik dan apotik
2.	Keamanan dan kenyamanan	a) penambahan jumlah personil pada hari libur b) bekerjasama dengan keamanan setempat, koramil dan kepolisian
3.	Keasrian	a) perawatan khusus pada situs peninggalan serta b) penambahan jumlah personil kebersihan c) sosialisasi kepada para pemilik usaha serta para pedagang agar bersama sama menjaga kebersihan lokasi wisata serta aset yang dimiliki
4.	Sarana prasarana	a) dibukannya jalur lintas Selatan b) pelebaran jalan menuju lokasi wisata c) lampu jalan menuju lokasi wisata d) kerjasama dengan tour travel atau agen wisata penyediaan kendaraan yang ada di Kota Malang
5.	Cinderamata	a) pembinaan pada masyarakat sekitar yang berjualan dilokasi wisata

No	Bidang	Upaya Pemerintah
		b) pembuatan paguyupan pedagang loka yang ada di area wisata c) penataan tempat bejualan/kios

Sumber : (Penulis, 2017)

a. Kuantitas dan kualitas fasilitas di objek wisata

Bentuk sarana dan prasarana yang ada di kawasan wisata Bahari Kabupaten Malang memiliki nilai jual secara ekonomi terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas pelengkap, fasilitas penunjang, prasarana umum dan prasarana sosial. Jenis sarana dan prasarana tersebut antara lain penginapan, warung makanan dan minuman, angkutan umum, lapangan berkemah dan lapangan bermain, MCK, toko/kios, PKL (pedagang kaki lima), panggung pertunjukan (pendopo), loket masuk, tempat parkir, air bersih, listrik, telekomunikasi dan pusat informasi pariwisata.

Ccontoh fasilitas saya ambil dari pantai balekambang, berada di desa srigonco, kecamatan Bantur Malang. bagi yang mengira pantai ini minim fasilitas dan pemandangannya biasa saja. Pantai ini juga dijuluki kembaran tanah lot indahny. Wisata malang yang satu ini cocok untuk dikunjungi. Tempat ini telah banyak dikunjungi wisatawan lokal dan asing dan fasilitasnya jug aterjamin. Adapun fasilitas yang ditawarkan di pantai balekambang adalah sebagai berikut:

1. Flying fox, setelah di resmikan pada tahun 2012, pantai ini menambah daya tarik wisatanya dengan adanya wahana flying fox dan akses yang mudah untuk menujunya. Jadi tidk khawatir

kalau disana hanya melihat pantai saja, flying fox dibuka hanya pada hari sabtu dan minggu saja.

2. Taman bermain anak, bukan hanya wisata pantai saja yang ditawarkan. Taman bermain anak juga disediakan agar anak-anak semakin terhibur berada disana. Dijamin akan merasa betah jika mengunjungi wisata Malang yang satu ini karena pas untuk liuran bersama keluarga.
3. Persewaan ATV, sebagai bukti bahwa pantai balekambang bukan tempat wisata yang terpencil dan kurang fasilitas. Pantai yang dijuluki kembaran tanah lot ini akan menjema menjadi lokasi wisata yang terkenal.
4. Makam Syeikh Abdul jalil, pantai balekambang juga menawarkan wisata religi, yaitu berkunjung atau berziarah ke makan Syeikh Abdul Jalil yang dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi dan jasanya untuk melawan penjajah. Untuk menuju wisata Malang satu ini perlu menempuh jarak 1 km dari pantai.



Sumber: (Penulis. 2017)

Gambar 4. Loket masuk pantai balekambang



Sumber: (Penulis. 2017)

Gambar 5. Kantor pelayanan



Sumber: (Penulis. 2017)

Gambar 6 Kamar mandi (toilet umum)



Sumber: (Penulis. 2017)

Gambar 7. Penginapan



Sumber: (Penulis. 2017)

Gambar 8. Gazebo



Sumber: (Penulis. 2017)

Gambar 9. Mushola

Hasil observasi diatas didukung oleh pernyataan Bapak Yasdi selaku kepala unit balekambang, adalah sebagai berikut :

“mengenai kualitas dan kuantitas di lokasi wisata pantai balekambang sudah sangat baik mas, hal ini dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas dan sarana prasarana yang ada di sini mas. Adapun kelengkapan yang sudah ada seperti kantor informasi, kantor keamanan, loket masuk, tempat penginapan dan syukur sudah ada penambahan di wibisono 1 dan wibisono 2, warung warung yang menyediakan kebutuhan para wisatawan yang berkunjung, toko cinderamata, mushola, toilet yang banyak tersebar di lokasi wisata dan ditambah dengan swadaya masyarakat tentang penambahan, terdapat 2 lokasi parkir yang luas dan mampu menampung volume kendaraan pengunjung meski di hari-hari besar yang terbaru yaitu bangunan caffe yang tedapat disamping kantor pelayanan, dan penamabahan penerangan pada lokasi wisata meskipun belum maksimal. Kami selalu berusaha untuk terus berbenah agar bisa lebih baik dan lebih baik lagi agar wisatawan yang berkunjung kemari dapat nyaman dan betah sehingga suatu saat bisa berkunjung kembali dan dapat bercerita diluar sehingga dapat menarik wisatawan lain sepulang dari sini.”(wawancara pada tanggal 02 Juni2017)

Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil wawancara bapak Yoyon (37 th) yang merupakan salah satu pengunjung Pantai Balekambang yang menyatakan bahwa:

“saya sangat senang berkunjung di Pantai Balekambang karena di Pantai Balekambang ini lokasinya sangat luas, saya tak bingung mau cari tempat parkir, mau cari makan minum, cari kamar mandi dll semua tersedia mau menginap pun juga ok mas, sehingga kami sekeluarga betah kalau berwisata ke pantai balekmbang dan ditambah lagi disini awal bertemunya saya dengan mantan pacar saya yang sekarang sudah sah jadi pendamping hidup saya.”(wawancara pada tanggal 12 Agustus 2017)

Di sekitar Pantai Balekambang juga sudah tersedia penginapan untuk para pengunjung. Pertama yaitu di penginapan Bamboo terdapat 8 kamar yang dibandrol Rp 150 ribu perharinya. Sedangkan yang terbaru adalah Hotel Wibisana sebanyak 10 kamar, yang kualitasnya lebih baik dibanding penginapan Bamboo. Kamar baru ini kelasnya dibandrol dengan tarif Rp 250 ribu per hari. Untuk kategori Large bisa menampung hingga enam orang dengan didukung fasilitas kamar mandi dan listrik. Dua jenis tipe penginapan ini memiliki fasilitas yang memadai dan seluruhnya menyuguhkan view langsung pantai dan laut lepas.



Sumber: (Penulis. 2017)

Gambar 10. Pantai Ngliyep

“menurut Bapak Sodik selaku kepala unit wisata pantai Ngliyep, upaya penambahan beberapa sarana fasilitas penunjang seperti spot selfi yang banyak tersebar di lokasi pantai dan tebing pantai untuk menambah daya tarik pengunjung mas dan sekarang lagi banyak wisatawan yang suka berfoto dan menguploadnya ke media sehingga secara tak langsung juga mempromosikan lokasi wisata pantai ngliyep ini mas, ada juga kami tambahkan tempat berjemur plus payung yang tersebar di pinggiran pantai, jembatan penghubung yang baru selesai pengerjaannya, dan yang terbaru tulisan Pantai Ngilyep yang baru saja selesai dapat dari dispar kab malang, tujuan penambahan tak lain untuk menambah daya tarik lokasi wisata serta pengunjung bisa betah dan nyaman mas.”(wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017)

b. Keamanan dan kenyamanan objek wisata

Menurut Direktur Administrasi PD Jasa Yasa, Asy'ari pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI, Polri serta PMI Kabupaten Malang. “Sudah siap menerjuankan personelnnya ke pantai Balekambang setiap adanya kegiatan. katanya, Senin (6/7/2015). Asy'ari bertekad, pantai Balekambang *zero accident*, asal pengunjung memperhatikan dengan

baik aturan yang telah ditetapkan pengelola. “Misalnya memperhatikan jarak aman pasang surut air laut, supaya pengunjung tidak hanyut terbawa ombak,” katanya.



Sumber: Penulis. 2017

Gambar 11. Wawancara dengan petugas keamanan

“keamanan Bapak Bukhori untuk keamanan di pantai balekambang dibantu polsek dan koramil setempat dengan 6 personil dari polsek serta 3 personil dari koramil. Sedangkan diwaktu hari hari besar liburan keamanan yang dikerahkan lebih banyak dari hari libur biasa, yakni dari polsek menurunkan 10 – 12 personil, dari koramil 10 -12 personil sedangkan dari DALMAS turun 1 pleton.”(wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017)



Sumber: (Penulis. 2017)

Gambar 12. Wawancara dengan petugas keamanan (Dinas Perhutani)

Wawancara diatas diperkuat oleh

“Bapak kusnadi selaku petugas keamanan dari pihak perhutani yg juga ikut mengamankan area wisata perhutani atau lokasi wisata yang dikelola oleh dinas perhutani yang lokasinya berdekatan dengan lokasi pantai yang dikelola oleh dinas pariwisata juga ikut mengelola area parkir samping MLDH wonodadi (lembaga masyarakat desa dan hutan) merupakan mitra dari pihak perhutani Petugas sar 2 personil dan petugas lapangan 4 personil tiap minggu. Dan pada hari hari libur besar personil lebih banyak dibandingkan dengan hari hari biasa 3 personil diturunkan secara bergantian dengan 2 sif. Wisata regent dari perhutani lokasi samping pantai yang juga menyediakan lokasi penginapan wonodadi beserta kamar mandi dan kantin. Keamanan dari MUSPIKA (personil dari kecamatan, koramil dan dari pihak kepolisian) bekejasama dengan 1 Pleton dari anggota DALMAS.”(wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017)

c. Keasrian objek wisata



Sumber: (Penulis. 2017)

Gambar 13. Pulau Ismoyo

Dari tahun ke tahun Pantai Balekambang memang semakin berkembang. Saat ini sudah banyak bermunculan penginapan dan juga hotel disekitar pantai ini yang membuat pantai ini semakin ramai pengunjung. Keindahan alam dan ombak yang cukup besar menjadi daya tarik tersendiri dari pantai ini. Pantai di Kabupaten Malang selain sebagai wisata alam, juga bisa disebut sebagai tempat wisata religi. Karena pada hari-hari tertentu, ribuan pengunjung datang ke pantai ini untuk melakukan ritual. Saya ambil contoh di Pantai Balekambang terdapat 3 Pulau yang sangat indah yaitu Pulau Ismoyo, Pulau Wisanggeni, dan Pulau Anoman. Pulau Pulau tersebut terletak di tengah samudera Hindia dan memiliki jarak yang tidak jauh dari pantai. Adanya jembatan yang menghubungkan antara pantai dan Pulau Ismoyo menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung karena terdapat

banguna pura yang dapat dijadikan tempat beribadah umat Hindu yang cukup tua di tengah tengah Pulau ini.

Pulau tersebut berjarak 80 meter dari pantai. Jembatan tersebut sangat mempermudah akses untuk menuju pura ini. Pantai balekambang Malang ini sering disebut sebagai Tanah Lotnya Jawa Timur. Pantai ini ramai dikunjungi ketika hari libur dan saat tahun baru Nyepi, dikarenakan banyak umat hindu yang merayakan hari raya Nyepi di pura yang berada di Pulau Ismoyo ini.

Selain umat Islam, umat Hindu pun menjadikan pantai ini sebagai tempat ibadah utama setiap setahun sekali. Tepatnya pada hari raya Nyepi, lokasinya di Pura Amarta Jati yang berada di Pulau Ismoyo. Pulau ini menjorok masuk dari bibir pantai sekitar 70 meter yang dihubungkan dengan jembatan. Keberadaan pura ini bagai magnet tersendiri bagi Pantai Balekambang. Tradisi Nyepi dengan menggelar ritual keagamaan Hindu selalu dinantikan wisatawan dari berbagai daerah, termasuk wisatawan asing.

Menurut bapak Made selaku pengunjung dari Bali yang mengunjungi pantai balekambang

“Saya sering berwisata ke pantai kalau berkunjung ke malang mas, terutama pantai balekambang, suasana disini sangat nyaman dan saya betah kalau ke pantai yang ada di malang ini dan lagi masih terdapat pure yang masih aktif dan terawat, air dan pesisir pantainya pun juga masih bersih mas. Disini hampir sama seperti pantai yang ada di tempat saya yaitu di Bali.”(wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017)



Sumber: Penulis. 2017

Gambar 14. Foto wawancara pantai ngliyep

“Bu Yunani warga malang yang datang bersama rombongan, saya senang sekali berkunjung ke pantai yang ada di kab malang mas. Lokasi pantai yang luas terutama di pantai balekambang dan ngliyep yang sering kali saya kunjungi, air laut yang masih bersih dan bening sehingga saya dapat melihat terumbu karang dan ikan kecil kecil, serta udara yang sejuk karena masih banyak

pepohonan yang tumbuh subur di sekitaran pantai kab malang ini mas.”(wawancara pada tanggal 10 September 2017)

d. Sarana dan prasarana transportasi menuju objek wisata

Jaringan jalan menuju kawasan wisata Balekambang bervariasi yaitu mulai dari Kota Malang sampai Kecamatan Gondanglegi merupakan jalan kelas I dengan panjang jalan ± 25 km, lebar jalan $\pm 6 - 8$ m dan perkerasan berupa aspal hotmix, kemudian dari Kecamatan Gondanglegi ke Kecamatan Bantur merupakan jalan kabupaten (kelas II) dengan panjang jalan ± 10 km, lebar jalan $\pm 4 - 5$ m dan perkerasan berupa aspal. Sedangkan dari Kecamatan Bantur ke lokasi kawasan wisata Balekambang merupakan jalan desa (kelas III) dengan panjang jalan ± 19 km, lebar jalan $\pm 3 - 4$ m dan perkerasan berupa aspal. Jaringan jalan tersebut terbagi atas dua arah dan tanpa median jalan serta tidak dilengkapi dengan marka jalan yang memadai seperti rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan dan pagar pengaman di sisi jalan. Kondisi jaringan jalan menuju kawasan wisata Balekambang banyak yang rusak. Untuk waktu tempuh ke Kawasan Wisata Balekambang dari Kota Malang apabila menggunakan kendaraan beroda empat sekitar 2 - 2,5 jam dan bila menggunakan kendaraan roda dua sekitar 1,5 - 2 jam. Hasil wawancara dengan kepala unit Pantai Balekambang bapak Yasdi:

“ Kalau untuk sarana transportasi khusus yang membawa wisatawan menuju lokasi Pantai Balekambang masih belum ada mas, untuk transportasi menuju ke lokasi Pantai Balekambang masih dikelola oleh pihak travelnya langsung yang ada di Kota Malang dan untuk

Transportasi umum yang menuju lokasi Pantai Balekambang masih belum tersedia, kebanyakan yang berkunjung menggunakan jasa travel, persewaan yang menyediakan bus, elf dan mobil. Banyak juga yang mengendarai kendaraan seperti motor roda dua maupun mobil pribadi mas.”(wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017)

Hasil wawancara tersebut juga di perkuat oleh kepala unit pantai Ngliyep bapak Sodiq yang juga mengatakan hal serupa terkait sarana transportasi umum yang membawa wisatawan menuju ke lokasi wisata pantai

“Mengenai sarana transportasi menuju ke lokasi pantai ngliyep atau angkutan umum untuk lokasi pantai ngliyep masih belum ada mas, kalau pun ada Sarana transportasi kami bekerja sama dengan pihak travel dan hotel yang ada di Malang berupa paket wisata yang sudah masuk dalam list wisata yang mereka tawarkan kepada tamu atau wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang sedang berkunjung ke Kota Malang yang datang untuk menggunakan jasa travel dari penginapan atau pun langsung ke agen travel khusus wisata yang ada di Kota Malang.”(wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017)

e. Kualitas cinderamata untuk wisatawan



Sumber: Penulis. 2017

Gambar 15. Cinderamata



Sumber: Penulis. 2017

Gambar 16. Cinderamata (Produk unggulan dari bahan kerang)

Pengrajin cinderamata asli daerah hasil dari laut yang diolah menjadi cinderamata oleh bapak Suwono dan ibunda bernama mbok Jem

“Pendapatan yang diperoleh berkisar dari 300 ribu sampai 1,5 juta rupiah setiap hari liburan dengan harga jual mulai dari 5 ribu sampai 40 ribu rupiah. Memanfaatkan bahan dasar cangkang binatang laut yang sudah mati dan sedikit sentuhan kreatifitas, dengan memberdayakan atau mendapatkan bahan baku dari anak anak pantai sekitar sehingga mereka yang melaut atau menyelam untuk cari lauk ataupun cari ikan untuk dijual lagi dapat memperoleh tambahan dari cangkang biota laut yang ikut dibawa kedaratan.”(wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017)

Direktur Utama PD Jasa Yasa, M Faiz Wildan menjelaskan, PD Jasa Yasa dalam rangka penataan telah merencanakan untuk membangun pasar wisata di Pantai Balekambang. Menurut keterangan beliau akan dibangun sebuah pedestrian sepanjang jalan menuju jembatan pura dengan melibatkan 140 pedagang kaki lima untuk berdagang souvenir dan oleh-oleh khas lainnya. Selain meningkatkan kualitas dan kuantitas pasar wisata bertujuan agar wisata pantai dapat dinikmati kebersihannya dan tertata rapi.

“Hal ini diperkuat oleh bapak Rudi selaku wakil kepala unit pantai balekambang beliau menyatakan bahwa memang sudah ada perencanaan terkait pembangunan lokasi pedagang kaki lima sekaligus penataan kembali untuk para pedagang swadaya yang telah menempati lokasi tersebut, masih menunggu waktu mas, harus ada pembicaraan lagi dengan para pedagang yang sudah berada di lokasi tersebut sehingga nantinya ketika rencana tersebut di setujui tinggal pelaksanaan dan menata saja mas, biar tidak ada miskomunikasi antara pihak terkait.”(wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017)

2. Kontribusi wisata bahari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang pada tahun 2014 – 2016.

a. Retribusi objek wisata

Menurut RENSTRA 2010-2015, Program Pengembangan Kemitraan, Pada program ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam megembangkan Daerah Tujuan Wisata dan meningkatkan pengelolaan Daerah pariwisata Unggulan yang ada di Kabupaten Malang dengan cara melibatkan masyarakat sekitar obyek wisata atau Progran Kemitraan, sehingga dapat meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang yang pada akhirnya akan mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya Pembinaan SDM di bidang Kepariwisataan,
- 2) Terlaksananya Pendataan usaha Akomodasi makanan dan minuman,
- 3) Terbentuknya Asosiasi pengusaha Akomodasi Makanan dan minuman (PHRI) di Kabupaten Malang.

Adapun implementasi dari RENSTRA tersebut dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini yang disertai hasil wawancara dengan pelaku usaha.



Gambar 17. Paguyupan pedagang pisang

Sumber: Penulis. 2017

Wawancara dengan para penjual pisang atau hasil bumi yang tergabung dalam paguyupan penjual pisang yang rata rata merupakan penduduk asli sekitar Pantai Balekambang atau lebih tepatnya beberapa dari Desa Srigonco, dimana di daerah ataupun desa tersebut hasil bumi seperti pisang, kelpa, singkong, pete dll tumbuh subur dan panen melimpah. Hasil bumi ini dijual oleh para ibu-ibu di lokasi Pantai Balekambang, karena banyaknya penjual akhirnya PD Jasa Yasa selalu pengelola Unit Balekambang membuatkan sebuah paguyupan pedagang pisang. Dibentuknya paguyupan ini agar para pedagang pisang bisa tertata dan memiliki lokasi sendiri.

“Wawancara dengan: Bu Kastik 10th bekerja, Bu Tiani 2th bekerja dan Bu Watinem 20 th bekerjakerja. Kami setiap harinya ya berjualan pisang hasil dari tegalan(kebun) dirumah mas, lumayan bisa untuk menambah pemasukan buat beli beras dan jajan anak.Kami yang berseragam biru-biru ini tergabung dalam Paguyupan Pedagang Pisang, yang dibina oleh pihak Pd Jasa Yasa. Tapi ya gitu mas, untuk pembuatan KTA kami dikenakan biaya dari PD Jasa Yasa Rp 60.000,- per KTA dengan anggota sebanyak 120 dan lagi biaya iuran Rp 5.000,- serta ikut menjaga kebersihan pantai dengan rutin membersihkan tiap minggu atau hari libur. Alhamdulillah pemasukan ada saja mas, meskipun tidak ramai tiap hari tapi cukup lumayan dari pada diem dirumah.” (24 Oktober 2017)

Selain dari program yang dimuat dalam RENSTRA tahun 2010-2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Retribusi objek wisata bahari juga dapat diperoleh dari kunjungan wisatawan yang didapat dari periode 2014-2016. Adapun penjabaran dari kunjungan wisata dapat dilihat pada tabel data kunjungan berikut:

Tabel 6. Data kunjungan wisatawan 2014

DATA	Tahun 2014
Wisatawan Mancanegara	80,792
Wisatawan Nusantara	3, 170,575
TOTAL JUMLAH	3,251,467

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. 2014

Jadi menurut tabel diatas pendapat yang didapat dari retribusi objek wisata pada tahun 2014 didominasi oleh wisatawan nusantara dengan jumlah 3.170.575 sedangkan untuk wisatawan asing jumlah pengunjung sebanyak 80.792. sehingga dapat disimpulkan bahwa

retribusi wisata yang didapat pada tahun tersebut terbilang cukup banyak untuk menunjang kualitas wisata di pantai selatan.

Tabel 7. Jumlah Wisatawan 2015

DATA	TRIWULAN				TOTAL
	I	II	III	IV	
Wisatawan Mancanegara	29,229	23,792	27,457	19,395	99,873
Wisatawan Nusantara	795,728	717,694	1,058,673	982,514	3,554,609
TOTAL JUMLAH	824,957	741,486	1,086,130	1,001,909	3,654,482

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. 2016

Jadi menurut tabel diatas pendapat yang didapat dari retribusi objek wisata pada tahun 2015 didominasi oleh wisatawan nusantara dengan jumlah 3.554.609 sedangkan untuk wisatawan asing jumlah pengunjung sebanyak 99.873. sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi wisata yang didapat pada tahun tersebut terbilang cukup dan belumnya meningkat dari tahun sbanyak untuk menunjang kualitas wisata di pantai selatan.

Tabel 8. Jumlah Wisatawan 2016

DATA	TRIWULAN				TOTAL
	I	II	III	IV	
Wisatawan Mancanegara	26,948	36,745	38,589	27,381	129,663
Wisatawan Nusantara	1,467,649	1,718,730	1,442,423	1,091,079	5,719,881
TOTAL JUMLAH	1,494,597	1,755,475	1,481,012	1,118,460	5,849,544

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. 2016

Jadi menurut tabel diatas pendapat yang didapat dari retribusi objek wisata pada tahun 2016 didominasi oleh wisatawan nusantara dengan

jumlah 5.719.881 sedangkan untuk wisatawan asing jumlah pengunjung sebanyak 129.663 sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi wisata yang didapat pada tahun tersebut terbilang cukup banyak untuk menunjang kualitas wisata di pantai selatan.

b. Pajak hotel dan restoran

Selain ketersediaan obyek wisata yang menjadi tujuan wisata, ketersediaan akan sarana berupa hotel dan restoran merupakan hal yang wajib tersedia di daerah tujuan wisata. Kabupaten Malang, dengan segala daya tarik wisatanya dan fasilitas pendukung yang dimiliki, maka hotel dan restoran dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah melalui sektor pajak. Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Malang periode 2009- 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Target dan realisasi pada efektifitas pajak hotel dan restoran kab malang tahun 2009 - 2013

Tahun	Target	Realisasi	%
2009	8.990.760.325,00	9.320.100.000,00	103.67
2010	9.030.420.000,00	10.460.315.000,00	115.83
2011	10.230.200.100,00	11.233.534.015,00	109.80
2012	11.720.200.000,00	12.230.453.356,00	104.35
2013	12.680.230.000,00	13.203.424.940,00	104.12
		56.447.827.311,00	

Sumber: (Arif. 2014)

Diketahui target dan realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Malang tahun 2009-2013 pajak berdasarkan Peraturan Bupati No 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, dari target diketahui

adanya perubahan yg signifikan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. dan dengan realisasi dari tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan.

Diketahui tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Malang tahun 2009-2013 pajak berdasarkan Peraturan Bupati No 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, dikategorikan “sangat efektif” karena telah mencapai target yang telah ditetapkan. tahun 2009 sebesar 103,67% (sangat efektif), tahun 2010 sebesar 115.83% (sangat efektif), tahun 2011 sebesar 109.30% (sangat efektif), tahun 2012 sebesar 104.35% (sangat efektif), tahun 2013 sebesar 104.12% (sangat efektif)

**Tabel 10. Kontribusi realisasi pajak hotel, restoran dan PAD
Kabupaten Malang Tahun 2009 – 2013**

Tahun	QX	QY	%	% (kumulatif)
2009	9.320.100.000,00	117.490.930.000,00	7,93	18,30
2010	10.460.315.000,00	118.391.668.000,00	8,84	20,39
2011	11.233.534.015,00	127.863.373.432,49	8,79	20,27
2012	12.230.453.356,00	131.592.151.393,89	9,29	21,45
2013	13.203.424.940,00	155.504.733.000,00	8,49	19,59
			43,34	100

Sumber: Arif. 2014

Diketahui kontribusi realisasi pajak restoran dan PAD, persentase kontribusi tahun 2009 sebesar 7.93%, tahun 2010 sebesar 8.84%, tahun

2011 sebesar 8.79% tahun 2012 sebesar 9.29% tahun 2013 menurun menjadi 8.49%. realisasi dalam PAD dikategorikan “sangat berkontribusi” dimana kontribusi terendah dari tahun 2009-2013 adalah pada tahun 2009 dan kontribusi terbesar dari tahun 2009 -2013 adalah pada tahun 2012.

Dengan diketahui tingkat kontribusi maka dapat di ketahui tingkat komulatif per tahunnya dari tahun 2009-2013. Tingkat komulatif pajak hotel dan restoran pada tahun 2009 sebesar 18,30%, pada tahun 2010 20,39%, pada tahun 2011 20,27%, pada tahun 2012 sebesar 21,45% dan pada tahun 2013 19,59%

Tabel 11. Kontribusi realisasi pajak hotel, restoran dan pajak daerah Kabupaten Malang tahun 2009 – 2013

Tahun	Qx	Qy	%	% (kumulatif)
2009	9.320.100.000,00	51.156.475.400,40	18,22	17,84
2010	10.460.315.000,00	47.015.790.000,00	22,25	21,78
2011	11.233.534.015,00	54.490.363.573,75	20,62	20,18
2012	12.230.453.356,00	60.316.559.392,00	20,28	19,85
2013	13.203.424.940,00	63.537.695.717,00	20,78	20,34
			102,14	100

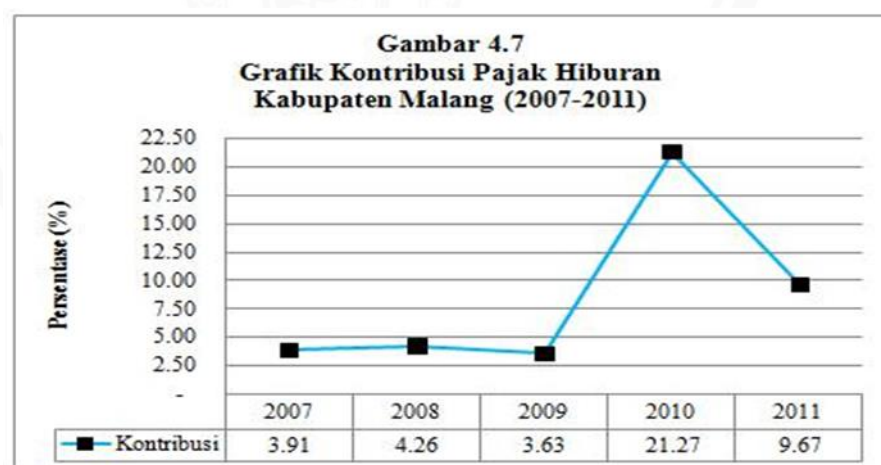
Sumber: Arif. 2014

Diketahui kontribusi realisasi pajak restoran dan pajak daerah, tahun 2009 sebesar 18,22%, tahun 2010 sebesar 22,25%, tahun 2011 sebesar 20,62%, tahun 2012 sebesar 20,28% dan tahun 2013 menurun menjadi 20,78%. Kontribusi terbesar pada pajak daerah dari tahun 2009-2013 dalah pada tahun 2010 dan kontribusi terendah dari tahun 2009-2013 dalah pada tahun 2009.

Dengan diketahui tingkat kontribusi maka dapat di ketahui tingkat komulatif per tahunnya dari tahun 2009-2013. Tingkat komulatif pajak hotel dan restoran pada tahun 2009 sebesar 17,84%, pada tahun 2010 21,78%, pada tahun 2011 20,18%, pada tahun 2012 sebesar 19,85% dan pada tahun 2013 20,34%

c. Pajak hiburan

Penerimaan PAD dari pajak hiburan dari data di bawah dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2009 yaitu sebesar 3,63%. Sedangkan kontribusi tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu 21,27%. Jenis tempat hiburan dan hiburan di Kabupaten Malang yang terkena pungutan pajak adalah pagelaran kesenian/musik/tari, karaoke, permainan bilyard, permainan ketangkasan, panti pijat/refleksi, pertandingan olah raga, taman wisata dan sejenisnya.



Sumber: Data diolah 2013

Gambar 18. Kontribusi Pajak Hiburan

C. Analisis Data

1. Upaya pemerintah daerah dalam mengelola wisata bahari guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan tidak lepas dari peran serta daerah dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara utuh dan terpadu. Dengan adanya otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan pembangunannya sendiri dapat berupaya keras dalam menyediakan dan mengali potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan perekonomian termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengembangkan dan mengoptimalkan sektor pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan di daerah menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan daerah, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi daerah setempat, mendorong pembangunan serta memperkenalkan nilai budaya bangsa. Dengan berkembangnya pariwisata menjadi suatu industri diharapkan mampu meningkatkan sumbangan terhadap PAD, mengingat pentingnya PAD sebagai sumber dari pembiayaan bagi pembangunan daerah.

Dengan demikian peneliti akan menganalisis lebih dalam tentang upaya pemerintah daerah dalam mengelola wisata bahari di Kabupaten Malang,

beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sektor kepariwisataan antara lain sebagai berikut:

a. Kuantitas dan kualitas fasilitas di objek wisata

Kualitas prasarana Pariwisata Yang terdiri atas Listrik, Air, Telekomunikasi, Pelayanan Kesehatan, Terminal/ pelabuhan. Berdasarkan hasil wawancara, jika dilihat dari kualitas memang sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yaitu PD Jasa Yasa bersama dengan pihak Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Malang sedang berusaha melakukan pembenahan baik dari sisi perbaikan maupun penambahan fasilitas. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap pihak masyarakat dan pelaku usaha. Jadi upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam meningkatkan kualitas obyek wisata bahari di Kabupaten Malang sudah sesuai dengan buku pencanangan tahun kunjungan wisata Indonesia (*Visit Indonesia Year 1991*).

Sedangkan dari segi Kuantitas penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjual makanan, warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (pramuniaga, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain), selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko perabot rumah tangga, dll), lalu jasa yang menyangkut

keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi dan pemadam kebakaran). Hal ini sesuai dengan yang ada pada hasil wawancara pada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Malang.

Secara keseluruhan dari Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam hal ini PD Jasa Yasa dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengenai kuantitas dan kualitas fasilitas pada wisata bahari di Kabupaten Malang dapat dikatakan sudah baik. Namun masih terdapat satu hal yang menjadi persoalan yaitu, tentang keberadaan beberapa kios pelaku usaha yang berada pada lokasi wisata yang tidak mau direlokasi oleh pihak pengelola, padahal upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas di objek wisata Balekambang.

b. Keamanan dan kenyamanan objek wisata

Faktor-faktor yang memengaruhi kenyamanan dan keamanan menurut buku perencanaan tahun kunjungan wisata Indonesia (*Visit Indonesia Year 1991*) yaitu faktor lingkungan, faktor kegiatan ekonomi dan faktor akses jalan pariwisata. Pertama, faktor lingkungan berdasarkan hasil penelitian terdapat dua aspek yang memiliki pengaruh terhadap ketidaknyamanan dan ketidakamanan wisatawan yaitu pengelolaan areal parkir dan kebersihan lingkungan. Pengelolaan tempat parkir di kawasan pariwisata masih belum jelas, walaupun diketahui bahwa penjagaan dan pemungutan biaya parkir dilakukan oleh pihak satpam pantai. Pengelolaan tempat parkir dan

besaran biaya parkir sering membuat pengunjung merasa tidak nyaman.

Sedangkan kondisi yang ada di kawasan wisata bahari kabupaten malang berbanding terbalik dengan teori yang ada. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara terkait kondisi faktor lingkungan, faktor ekonomi maupun akses jalan menuju lokasi wisata bahari di Kabupaten Malang. Seperti pernyataan sebelumnya bahwa faktor lingkungan yang terdiri dari kebersihan dan areal parkir kurang maksimal dalam pemanfaatannya, karena kondisi kebersihan lingkungan yang kurang terjaga dipengaruhi juga oleh kesadaran wisatawan untuk menjaga kebersihan lingkungan wisata selain itu sarana yang disediakan pengelola wisata kurang maksimal contohnya penyediaan bak sampah yang masih minim. Namun untuk sisi areal parkir untuk saat ini memang dalam kondisi yang maksimal untuk pemanfaatannya.

Faktor kegiatan ekonomi sendiri yang ada pada lokasi wisata juga kurang merata. Adanya pariwisata tidak mempengaruhi secara rata ekonomi penduduk sekitar wilayah wisata. Bisa dikatakan untuk yang memiliki usaha khas oleh-oleh wisata kurang berkembang. Hanya beberapa penduduk saja yang memiliki usaha makanan maupun minuman sisanya cinderamata namun tidak memiliki kekhususan sehingga untuk oleh-oleh tersebut dapat dibuat untuk perorangan bukan untuk kelompok penduduk.

Faktor akses jalan wisata sendiri juga belum mendukung maksimal. Jalan menuju tempat wisata pada kondisi nyatanya masih belum beraspal. Jalan akses yang ada masih berbatu dan rawan longsor karena memiliki tanah gerak. Namun ada beberapa wisata pesisir memang sudah sangat ramai wisatawan ada perbaikan yang sangat signifikan dari sebelumnya. Misalnya beberapa wisata pantai sudah berubah secara signifikan yaitu pantai balekambang, ngliyep dan sebagainya hanya saja ukuran jalan yang kurang lebar. Tujuan pelebaran akses jalan untuk mengantisipasi ketika memasuki hari libur, khususnya hari libur besar yang selalu ada lonjakan pengunjung sehingga menyebabkan antrian volume kendaraan dari pengunjung yang panjang dan menjadi penyebab kemacetan.

c. Keasrian objek wisata

Cara-cara menjaga keasrian objek wisata dalam negeri seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-mencoret tembok, melakukan penghijauan disekitar pegunungan, tidak membuang sampah ke sungai yang nantinya bermuara ke laut, melestarikan terumbu karang, dan sebagainya seperti yang disebutkan pada buku perencanaan tahun kunjungan wisata Indonesia (*Visit Indonesia Year 1991*).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, dapat diketahui bahwa wisata bahari yang ada di Kabupten Malang belum memiliki nilai keasrian yang dapat ditonjolkan sebagai wisata alam. Pertama, masih banyak ditemukan banyak coretan-coretan tangan jahil pengunjung yang masih

kurang sadar atas tindakan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian, seperti pada jembatan penghubung anantara pantai balekambang ke pulau ismoyo yang masih terdapat coretan coretan, di karang karang pantai balekambang, tebing yang ada pada pantai ngliyep dan coretan pada wahana atau sara penunjang lainnya sehingga dapat mengurangi nilai keasrian suatu lokasi wisata serta fasilitas yang telah disediakan.

Kedua, apabila dilihat dari keasrian alam, wisata alam yang ada sudah tidak seperti sedia kala yang masih minim bangunan. Karena untuk saat ini wisata alam yang ada sudah banyak pembangunan fisik yang jaraknya tidak jauh dari pantai. Misalnya untuk pantai-pantai yang sudah ramai pengunjung seperti pantai balekambang banyak bangunan yang kokoh misalnya bangunan penginapan, caffe, maupun angkringan-angkringan lain yang dibangun dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang berdampak pada berkurangnya keasrian yang dimiliki oleh obyek wisata bahari.

Ketiga, kembali lagi pada kesadaran pengunjung dilihat dari sampah yang berserakan termasuk sangat kotor. Penyebab dari kotornya wilayah tersebut juga disebabkan oleh kurangnya petugas kebersihan yang disediakan pada obyek wisata. Bahkan untuk kasus kebersihan ini di salah satu pantai yang cukup ramai pengunjung seperti Pantai Balekambang untuk kebersihannya melibatkan paguyuban pedagang pisang untuk menunjang kuantitas petugas kebersihan demi menjaga kebersihan sehingga pengunjung merasa nyaman. Sehingga hal tersebut

dapat mempengaruhi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata seperti yang dijelaskan oleh (Suswantoro, 1997:19)''

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata''.

d. Sarana dan prasarana transportasi menuju objek wisata

Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Termasuk prasarana pariwisata meliputi: jalan raya, jembatan dan terminal bus, rel kereta api dan stasiun, pelabuhan udara (*air-port*) dan pelabuhan laut (*sea port/harbour*)

Sarana Pariwisata adalah fasilitas dan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maju mundurnya sarana kepariwisataan tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan seperti dalam buku pencanangan tahun kunjungan wisata Indonesia (*Visit Indonesia Year 1991*)

Pertama, mengenai akses jalan menuju ke obyek lokasi wisata bahari yang ada di kabupaten malang. kondisi jalan yang menuju ke lokasi wisata Pantai Balekambang sudah dapat dikatakan sudah baik hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kepala Unit dan diperkuat dengan hasil observasi dilapangan. Disisi lain pemerintah juga sedang berupaya mempermudah wisatawan untuk berkunjung ke obyek

wisata bahari yang sedang dikembangkan, dengan adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan.

Kelemahan untuk sarana transportasi sendiri adalah tidak adanya armada angkutan umum yang disediakan untuk menuju ke lokasi wisata bahari. PD Jasa Yasa sendiri hingga saat ini juga selalu mengusahakan untuk kemudahan wisatawan menuju lokasi dengan menyediakan biro perjalanan yang berada di Kota Malang tepatnya di sebelah Alun-Alun Kota Malang.

e. Kualitas cinderamata untuk wisatawan

Ada empat alasan para wisatawan membeli cinderamata. Pertama karena produknya menarik, unik, dan merupakan ikon DTW; Kedua, kualitas atau mutu; Ketiga, *packaging*-nya bagus menarik; Keempat, harga. Dengan mengetahui alasan itu, pengrajin hendaknya menekankan pada pentingnya keunikan dan kualitas produk mengingat wisatawan menekankan pada wujud produk. Wisatawan cenderung tidak terlalu peduli dengan harga, tapi lebih mementingkan kualitas dan keunikan produk.

Hal lain yang tak kalah penting diperhatikan adalah produk tersebut mudah dibawa, tidak berat, kemasan yang bagus, dan kualitas yang bagus. Peluang menarik bagi pengusaha UKM yang berkulat dengan cinderamata adalah menerobos pasar ekspor. Untuk mencapai hal itu diperlukan inovasi produk kerajinan.

Guna menciptakan inovasi dan pengembangan produk, dapat dilakukan dengan mengikuti trend, menciptakan trend, dan implementasi produk ke semua aspek. Namun demikian, dalam menciptakan design, standar, dan spesifikasi, perlu diperhatikan negara tujuan. Setidaknya mengetahui aturan, adat, warna favorit, dan musim di negara tujuan ekspor. Bandingkan juga soal harga dengan pesaing, kualitas harus sesuai sample dan repeat order, serta pengiriman sesuai jadwal.

Satu keunggulan Jawa Timur adalah mempertahankan ciri khas, keunikan dan kearifan lokal sebagai unsur daya saing. Hal itu bisa diciptakan dengan memperhatikan etnik, adat budaya, sumber daya alam, dan pemanfaatan bahan lokal.

Dilihat dari beberapa aspek yang ada untuk kualitas cinderamata yang ada di wisata bahari Kabupaten Malang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari besaran pendapatan yang diperoleh berkisar dari 300 ribu sampai 1,5 juta rupiah setiap hari liburan dengan harga jual mulai dari 5 ribu sampai 40 ribu rupiah. Dengan memanfaatkan bahan dasar cangkang binatang laut yang sudah mati ataupun kerang serta pasir laut dan sedikit sentuhan kreatifitas. Pengrajin cinderamata memberdayakan atau mendapatkan bahan baku dari anak-anak yang tinggal di sekitar pantai, dimana mereka yang melaut untuk mencari ikan untuk dijual lagi ataupun untuk dikonsumsi sendiri beserta cangkang dan karang yang ikut dibawa kedaratan untuk dijadikan cinderamata.

2. Kontribusi wisata bahari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang pada tahun 2014 – 2016.

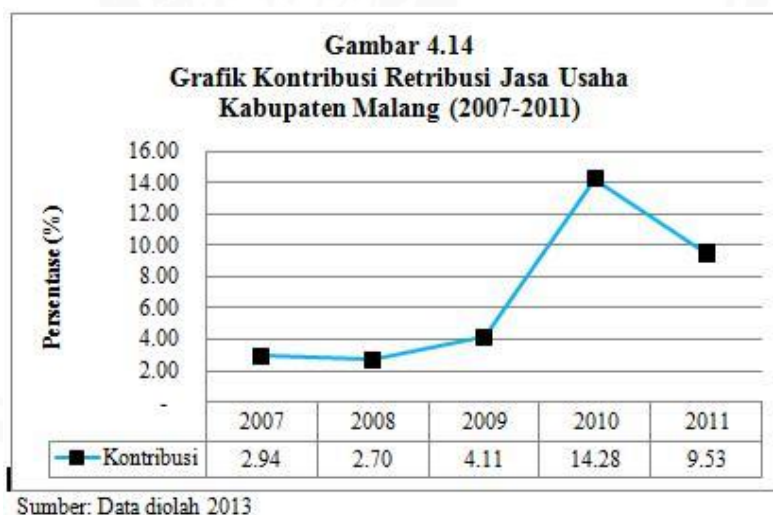
Pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah sebagai salah satu alternatif bagi pemasukan pendapatan daerah. Adapun hasil perusahaan daerah yang berhubungan dengan sektor pariwisata adalah hasil yang didapat oleh perusahaan daerah yang mengelolah obyek wisata. Kontribusi wisata bahari didapat dari sumber-sumber penerimaan obyek wisata yang meliputi:

a. Retribusi objek wisata

Pendapatan obyek pariwisata adalah merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut. Menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 tahun 1997 bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Pajak Daerah atau yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Menurut Munawir (1997) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat

ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak akan dikenakan iuran.

Definisi retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan disediakan pemerintah pada masyarakat berpangkal pada efisiensi ekonomis. Teori ekonomi mengatakan, harga barang atau layanan jasa yang diberikan pada masyarakat hendaknya didasarkan pada biaya (*marginal cost*), yakni biaya untuk melayani konsumen yang terakhir (Devas,dkk 1989:95).



Sumber: Prameka. 2013

Gambar 19. Kontribusi Restribusi Jasa Usaha

Persentase kontribusi pada tahun 2007 sebesar 2,94% kemudian menurun menjadi 2,7% pada 2008 dan meningkat di tahun 2009 dan

2010 menjadi 4,11% dan 14,28%. namun terjadi penurunan menjadi 9,53% pada tahun 2011. Persentase kontribusi tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu sebesar 14,28%. Semakin tinggi penerimaan sektor retribusi jasa usaha. maka semakin berkembang usaha yang ada di Kabupaten Malang, baik usaha kecil menengah maupun besar.

Pendapatan dari retribusi obyek wisata bahari di Kabupaten Malang dipengaruhi oleh naik turunnya jumlah wisatawan yang datang untuk berkunjung ke lokasi wisata bahari yang ada di Kabupaten Malang. Kenaikan jumlah retribusi obyek wisata bahari terjadi pada saat hari - hari libur besar serta menurun pada hari – hari biasa. Kendati demikian pemasukan dari retribusi obyek wisata bahari yang ada di Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hal ini juga berpengaruh pada penghasilan para pelaku usaha yang tersebar di Kabupaten Malang baik usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar. Selain itu juga membuka lapangan usaha baru dengan memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar sehingga sedikit banyak juga mampu mendorong perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang, khususnya daerah yang berdekatan langsung dengan lokasi obyek wisata atau lokasi produksinya sendiri yang mampu menyerap tenaga kerja dari warga sekitar.

b. Pajak hotel dan restoran

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan, fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek seperti gubug pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain: telepon, faksimili, teleks, foto copi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain: pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran.

Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang menjadi pelaku dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Tabel 12. Efektifitas Pajak Hotel Kabupaten Malang 2007 – 2011

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	275.000.000	249.132.641	90,59	Efektif
2	2008	350.000.000	558.313.434	159,52	Sangat Efektif
3	2009	375.000.000	510.042.122	136,01	Sangat Efektif
4	2010	400.000.000	519.984.875	130,00	Sangat Efektif
5	2011	500.000.000	883.498.569	176,70	Sangat Efektif

Sumber: Prameka. 2013

Jika dilihat dari persentase efektifitas penerimaan pajak hotel terjadi peningkatan dari tahun 2007 sebesar 90,59% menjadi 159,52% pada 2008, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 136,01% dan tahun 2010 sebesar 130%. Pencapaian efektifitas tertinggi terdapat pada tahun 2011 yaitu sebesar 176,70%. Penerimaan pajak hotel selalu memenuhi target mulai tahun 2008 hingga 2011 dengan kategori sangat efektif.

Tabel 13. Efektifitas Pajak Restoran Kabupaten Malang 2007 – 2011

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	500.000.000	439.984.383.00	88,00	Cukup Efektif
2	2008	500.000.000	547.496.651.00	114,90	Sangat Efektif
3	2009	500.000.000	602.758.526	109,59	Sangat Efektif
4	2010	500.000.000	703.299.002	122,31	Sangat Efektif
5	2011	500.000.000	910.551.943	151,76	Sangat Efektif

Sumber: Prameka. 2013

Jika dilihat dari persentase efektifitas penerimaan pajak restoran terjadi peningkatan dari kriteria cukup efektif menjadi sangat efektif. Diketahui bahwa setiap tahunnya DPPKA menaikkan target anggaran bagi pajak restoran, diikuti dengan hasil realisasinya yang juga terus meningkat melampaui target. Ini menandakan bahwa target anggaran yang ditentukan oleh DPPKA realistis dan menggambarkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran baik. Pemungutan pajak restoran mulai masuk kategori sangat efektif pada tahun 2008, mulai tahun tersebut pemerintah melakukan pengukuran potensi daerah pada Kabupten Malang secara menyeluruh pada setiap wajib pajak restoran.

Dari kesimpulan yang lebih detail tersebut kontribusi redistribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kabupaten Malang termasuk pencapaian yang sangat maksimal. Terkait pajak tersebut di wilayah bahari juga memiliki beberapa penginapan maupun restoran untuk

wisatawan. Diluar wilayah bahari, hotel dan restoran juga mendukung wisatawan yang ingin mengunjungi wisata Kabupaten malang yang didominasi oleh wisata bahari.

Maka dapat disimpulkan kontribusi yang diberikan pajak hotel dan restoran di wilayah bahari sangat mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dalam konteks ini realita yang ada sudah sesuai dengan kajian teoritis yang seharusnya. Karena adanya wisata bahari di Kabupaten Malang berdampak positif pada pendapatan daerah.

c. Pajak hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran yaitu:

1. Tontonan film
2. Pagelaran kesenian musik, tari dan atau busana
3. Konteks kecantikan binaraga dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotik, karaoke, club malam dan sejenisnya
6. Sirkus akrobat dan sulap
7. Permainan bilyard, golf, bowling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap, dan pusat kebugaran (*fitness center*)
10. Pertandingan olahraga.

Tabel 14. Efektifitas Pajak Hiburan Kabupaten Malang 2007 – 2011

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas	Keterangan
1	2007	2.875.000.000	3.301.524.243	114,84 %	Sangat Efektif
2	2008	3.200.000.000	4.379.470.871	136,86 %	Sangat Efektif
3	2009	3.500.000.000	5.566.298.075	159,04 %	Sangat Efektif
4	2010	5.000.000.000	8.375.470.995	167,47 %	Sangat Efektif
5	2011	6.000.000.000	6.252.826.091	104,21 %	Sangat Efektif

Sumber: Prameka. 2013

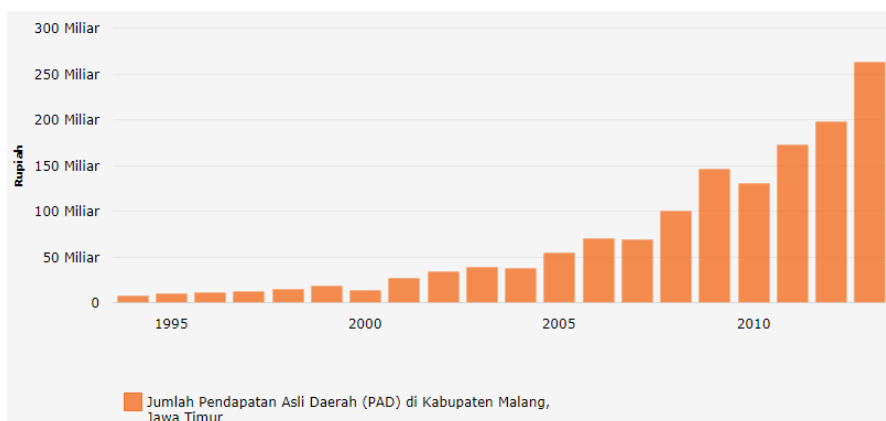
Jika dilihat dari target dan realisasi, pajak hiburan selalu memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria sangat efektif selama 5 tahun. Untuk persentase efektifitas penerimaan pajak hiburan terjadi peningkatan terus selama 4 tahun (2007-2010) dari 114,84% hingga 167,47% namun untuk tahun 2011 mengalami penurunan yang nyaris tidak memenuhi target yaitu sebesar 104,21%. Untuk target pajak hiburan seperti pajak daerah lainnya, DPPKA selalu memasang target yang lebih tinggi di setiap tahunnya, dikarenakan potensi hiburan dari segi pariwisata Kabupaten Malang yang selalu dikembangkan oleh pemerintah.

Jika dilihat dari aspek yang ada di pajak hiburan pendapatan wilayah bahari tidak memberikan pemasukan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dikarenakan untuk hiburan yang ada di wilayah bahari masih bersifat momentum artinya ketika ada acara sakral saja

maka ada hiburan misalnya pertunjukan seni tari, wayang kulit maupun gelar budaya lainnya. Pajak hiburan yang didapat seperti tabel diatas merupakan pendapatan diluar wilayah bahari. Wilayah bahari hanya memberikan kontribusi yang dapat dikatakan tidak terlalu besar untuk pendapatan daerah. Namun jika dilihat dari dampak adanya wisata bahari secara teoritis wisata bahari di Kabupaten Malang sudah memberikan peran positif terhadap pajak hiburan mwskipun tidak terlalu besar.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang secara persentase menyumbang sekitar 10 persen lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 3,8 triliun pada tahun 2016. Persentase tersebut merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan berbagai daerah yang ada di Jawa Timur (Jatim) yang rata-rata PAD-nya di bawah 10 persen.

Tahun 2016, PAD Kabupaten Malang yang ditarget sebesar Rp 425 miliar terlampaui dan naik sekitar 18,29 persen menjadi Rp 502 miliar. Di semester pertama 2017, PAD bahkan telah tembus pada kisaran Rp 600 miliar. Dengan adanya trend kenaikan dalam PAD Kabupaten Malang tersebut, Bupati Malang Dr H Rendra Kresna tidak berpuas diri dan berleha-leha. Sebaliknya, dia mengharapakan adanya kenaikan PAD nantinya diakhir tahun.



Sumber: Kab. Malang. 2010

Gambar 20. PAD Kab Malang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang mencapai Rp 3,43 Triliun pada tahun lalu. Angka tersebut hanya 99,47 persen dari target yang diinginkan. Bupati Malang, H. Rendra Kresna mengatakan tidak tercapainya target itu dikarenakan beberapa sektor yang masih kurang tergarap secara maksimal. Pemasukan dari retribusi wisata, retribusi parkir, dan lain-lain belum menjadi kontribusi sesuai yang diharapkan.

Selain PAD yang tidak memenuhi target, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang 2016, sektor pariwisata memang menjadi andalan karena Kabupaten Malang memiliki potensi yang bagus di sektor tersebut. “Pada tahun lalu dari sektor pariwisata ada sekitar lima juta pengunjung. Tapi yang dikelola langsung pemerintah hanya pantai Balekambang dan pantai Ngliyep, itu pun juga kerjasama dengan Perhutani.”

Pengembangan ekonomi lokal menurut Blakely dan Bradshaw adalah proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat

terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan menurut World Bank (2001) adalah proses dimana para pelaku pembangunan, bekerja kolektif dengan mitra dari sektor publik, swasta dan non pemerintah, untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (dalam Nurzaman, 2002).

Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal sangat penting, dalam hal ini pemerintah daerah berperan menjalankan fungsinya sebagai pelopor pengembangan, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Peranan pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam hal memperhatikan infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan industri, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Selain pemerintah daerah, peranan swasta dan kelompok masyarakat juga diperlukan dalam kegiatan manajemen wilayah dan pencari solusi atas permasalahan tertentu. Sementara itu, salah satu kebijaksanaan pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif, salah satunya melalui pengembangan potensi ekonomi daerah (Sjafrizal, 2008). Potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh Suparmoko (2002) sebagai:

“kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.”

Muktianto (2005) menjelaskan bahwa pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), komponen sumber daya manusia, teknologi dan sistem kelembagaan. (dikutip dari Sumiharjo, 2008, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1 | 191 h.12). Dalam menelaah PDRB dilakukan untuk mengetahui potensi basis dan non basis. Suatu daerah yang memiliki keunggulan memberikan kekhasan tersendiri yang tidak ada pada daerah lain, sehingga sektor unggulan tadi dapat dikatakan sebagai kegiatan basis (Triyuwono & Yustika, 2003).

Tourism is a vast growing industry in the world and the increasingly rapid economic growth in the Asia Pasific region has opened opportunities for tourism development in Indonesia. The potentials for tourism development in Indonesia are among others : (1) rich cultural heritage; (2) scientific landscape; (3) proximity to major growth markets of Asia; (4) large and increasingly wealthy population that will provide a strong dosmetic market; (5) large, relatively low cost and work force (Faulkner,1997). Bahwa potensi pembangunan wisata yang ada di Indonesia selama ini yaitu: budaya, kondisi alam, sesuai pasar Asia, pertumbuhan wisata domestik, pembiayaan yang murah harga maupun tenaga kerjanya.

Definisi lainnya mengenai ekowisata, seperti yang diuraikan oleh Green Tourism Association, adalah suatu pembangunan pariwisata yang memiliki empat pilar atau atribut yaitu;

1. Environmental responsibility; mengandung pengertian proteksi, konservasi atau perluasan sumber daya alam dan lingkungan fisik untuk menjamin kehidupan jangka panjang dan keberlanjutan ekosistem, misalnya wisata alam Ujung Kulon yang akan menghasilkan sebuah konsep ekosistem berkelanjutan dari satwa badak bercula;
2. Local economic vitality; mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi lokal, bisnis dan komunitas untuk menjamin kekuatan ekonomi dan keberlanjutan (sustainability) misalnya dampak dari pembangunan lokasi wisata biasanya akan diikuti oleh maraknya kegiatan ekonomi lokal ;
3. Cultural sensitivity; mendorong timbulnya penghormatan dan apresiasi terhadap adat istiadat dan keragaman budaya untuk menjamin kelangsungan budaya lokal yang baik misalnya melalui wisata budaya, maka orang akan mengenal budaya daerah atau Negara lain dan menimbulkan penghormatan atas kekayaan budaya tersebut.
4. Experiential richness; menciptakan atraksi yang dapat memperkaya dan meningkatkan pengalaman yang lebih memuaskan, melalui partisipasi aktif dalam memahami personal dan keterlibatan dengan alam, manusia, tempat dan/atau budaya (Yoeti, 2006;26).

Upaya Pemerintah meningkatkan PAD melalui pariwisata selain yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang telah dirumuskan dan disepakati bersama antara stakeholders pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Malang sebagai Bumi Agro-Wisata yang terkemuka di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menunjuk Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa sebagai pengelola beberapa Pantai di

Kabupaten Malang. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa. Pengelolaan potensi obyek wisata ini harus dilaksanakan secara optimal sehingga sebagai ikon wisata Kabupaten Malang diharapkan mampu menjadi salah satu gerbong lokomotif bagi pembangunan ekonomi daerah. Hasil observasi peneliti usaha pembangunan fisik yang telah dilakukan yaitu berupa:

1. Membuka jalur lintas selatan
2. Penambahan fasilitas wisata misalnya café, penginapan dll
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pada objek wisata
4. Menghimpun penduduk dalam sebuah paguyuban untuk meningkatkan perekonomian misalnya paguyuban pedagang pisang
5. Penambahan beberapa wahana pariwisata misalnya flying fox, spot selfie, tempat bermain anak-anak dan lain sebagainya.

Jika dievaluasi melalui hasil observasi peneliti dan penelitian lainnya. Upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah belum berdampak positif pada kontribusi PAD Kabupaten Malang. Minimnya kontribusi yang diberikan karena Pemerintah Daerah belum melakukan pengelolaan yang merata artinya Pemerintah daerah hanya mengelola beberapa wisata yang memang sudah padat pengunjung, Pemerintah kurang melakukan penggalian atau pengembangan keseluruhan objek wisata bahari yang ada di Kabupaten Malang.

Menurut hasil penelitiannya lainnya menyatakan bahwa wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Malang hanya 2 saja yaitu Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep dari 52 objek wisata yang ada di Kabupaten Malang artinya 50 objek wisata sisanya masih dikelola

mandiri oleh masyarakat sekitar secara swadaya. Jika pengembangan yang dilakukan Jasa Yasa menurut RPJM yang melibatkan banyak pihak dilakukan merata keseluruh wisata bahari maka dapat dipastikan kontribusi yang diberikan untuk PAD akan signifikan karena pada dasarnya kebutuhan wisata akan terus meningkat disamping kepadatan aktifitas dan kejenuhan masyarakat.

Tabel 15. Pertumbuhan Pengunjung

DATA	2014	2015	2016
Wisata Mancanegara	80.792	99.873	129.663
Wisata Nusantara	3.170.575	3.554.609	5.719.881
TOTAL	3.251.367	3.654.482	5.849.544

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Malang. 2017

Jadi melihat dari kondisi wisata bahari di Kabupaten Malang sudah melibatkan pengembangan ekonomi lokal yang ada di wilayah tersebut. Seperti pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, modal investasi, skala ekonomis, pasar, situasi ekonomi, kemampuan pemerintah pusat dan daerah juga berperan sangat aktif dalam wisata bahari Kabupaten Malang. Hanya saja ekonomi yang diciptakan belum merata keseluruh daerah sekitarnya, namun peran warga sangat dilibatkan dalam pengembangan wilayah. Saya ambil contoh untuk pedagang, pengelola parkir, penjaga pantai, tenaga kebersihan dan lain sebagainya dilakukan oleh masyarakat sekitar sendiri. Sehingga dampak panjang yang didapat dari pengembangan tersebut membantu meningkatkan PAD karena terciptanya lapangan kerja baru, kemudian peran perhutani juga bisa ditingkatkan menyeluruh ke semua wisata bukan hanya beberapa

saja. Namun ada salah satu peran yang belum dilibatkan oleh pemerintah yaitu peran swasta demi untuk menunjang pengembangan wisata bahari seperti yang dijelaskan oleh Sjafrizal, 2008 dijelaskan bahwa dalam sebuah pengembangan membutuhkan manajemen yang bagus dengan melibatkan Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jika dilihat dari kualitas memang sampai sekarang wisata bahari di Kabupaten Malang selalu melakukan pembenahan baik dari sisi perbaikan maupun penambahan fasilitas. Contohnya jumlah pedagang juga mulai bertambah sehingga memudahkan wisatawan untuk mencari makanan maupun minuman, bertambahnya toko oleh-oleh maupun cinderamata misalnya seperti toko baju dan lain sebagainya. Sehingga untuk beberapa lokasi wisata yang belum cukup ramai pengunjung masih minim fasilitas kesehatan maupun keamanan. Contohnya untuk fasilitas yang sudah memenuhi standart berada di pantai Ngliyep dan pantai Balekambang, yang juga sudah memiliki ambulan sebagai fasilitas khusus yang dimiliki secara pribadi untuk wilayah pantai tersebut selain itu juga memiliki tempat pengobatan dapat dikatakan sebuah puskesmas.

Sedangkan kondisi yang ada di kawasan wisata bahari di Kabupten Malang berbanding terbalik dengan teori yang ada. Sebagai contoh saya ambil untuk kondisi faktor lingkungan, faktor ekonomi maupun akses jalan yang ada di kawasan pesisir Kabupaten Malang. Seperti pernyataan sebelumnya bahwa faktor lingkungan yang terdiri dari kebersihan dan areal parkir kurang maksimal dalam pemanfaatannya, karena kondisi kebersihan lingkungan yang

kurang terjaga dipengaruhi juga oleh kesadaran wisatawan untuk menjaga kebersihan lingkungan wisata, selain itu sarana yang disediakan pengelola wisata kurang maksimal contohnya penyediaan bak sampah yang masih minim.

Cara-cara menjaga keasrian objek wisata bahari dalam negeri seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-mencoret tembok, melakukan penghijauan disekitar pegunungan, tidak membuang sampah ke sungai yang nantinya bermuara ke laut dan melestarikan terumbu karang masih kurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wisata bahari yang ada di Kabupten Malang belum memiliki nilai keasrian yang dapat ditonjolkan sebagai wisata alam. Sebab masih banyak ditemukan banyak coretan-coretan tangan jahil manusia atau pengunjung yang masih kurang sadar atas tindakan yang dilakukan atau SDM yang saya rasa masih kurang untuk menjaga kelestarian.

Jika dilihat dari rencana pemerintah terkait transportasi di Kabupaten Malang demi mendukung wisata bahari memang sudah direncanakan untuk membangun pelabuhan udara namun hingga saat ini tidak terealisasi. Namun untuk akses jalan pemerintah sudah mendukung dengan dibangunnya Jalur Lintas Selatan. Kelemahan untuk sarana transportasi sendiri adalah tidak adanya armada angkutan umum yang disediakan untuk menuju ke lokasi wisata bahari. PD Jasa Yasa sendiri hingga saat ini juga selalu mengusahakan untuk kemudahan wisatawan menuju lokasi dengan menyediakan biro perjalanan yang berada di Kota Malang tepatnya di sebelah Alun-Alun Kota Malang.

Dilihat dari beberapa aspek yang ada untuk kualitas cinderamata yang ada di wisata bahari Kabupaten Malang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari besaran pendapatan yang diperoleh berkisar dari 300 ribu sampai 1,5 juta rupiah setiap hari liburan dengan harga jual mulai dari 5 ribu sampai 40 ribu rupiah. Dengan memanfaatkan bahan dasar cangkang binatang laut yang sudah mati ataupun kerang serta pasir laut dan sedikit sentuhan kreatifitas. Pengrajin cinderamata memberdayakan atau mendapatkan bahan baku dari anak-anak yang tinggal di sekitar pantai, dimana mereka yang melaut untuk mencari ikan untuk dijual lagi ataupun untuk dikonsumsi sendiri beserta cangkang dan karang yang ikut dibawa kedaratan untuk dijadikan cinderamata.

Pendapatan dari retribusi obyek wisata bahari di Kabupaten Malang dipengaruhi oleh naik turunnya jumlah wisatawan yang datang untuk berkunjung ke lokasi wisata bahari yang ada di Kabupaten Malang. Kenaikan jumlah retribusi obyek wisata bahari terjadi pada saat hari-hari libur besar serta menurun pada hari-hari biasa. Kendati demikian pemasukan dari retribusi obyek wisata bahari yang ada di Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Maka dapat disimpulkan kontribusi yang diberikan pajak hotel dan restoran di wilayah bahari sangat mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dalam konteks ini realita yang ada sudah sesuai dengan kajian teoritis yang seharusnya. Karena adanya wisata bahari di Kabupaten Malang berdampak positif pada pendapatan daerah.

Jika dilihat dari aspek yang ada di pajak hiburan pendapatan wilayah bahari tidak memberikan pemasukan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dikarenakan untuk hiburan yang ada di wilayah bahari masih bersifat momentum artinya ketika ada acara sakral saja maka ada hiburan misalnya pertunjukan seni tari, wayang kulit maupun gelar budaya lainnya. Pajak hiburan yang didapat seperti tabel diatas merupakan pendapatan diluar wilayah bahari. Wilayah bahari hanya memberikan kontribusi yang dapat dikatakan tidak terlalu besar untuk pendapatan daerah. Namun jika dilihat dari dampak adanya wisata bahari secara teoritis wisata bahari di Kabupaten Malang sudah memberikan peran positif terhadap pajak hiburan meskipun tidak terlalu besar.

B. Saran

1. Melihat dari terus meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata bahari yang ada di Kabupaten Malang, Pemerintah atau pun Dinas terkait perlu mengupayakan fasilitas pendukung pada objek wisata yang ada di Kabupaten Malang seperti fasilitas yang sudah ada pada Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep yang dapat dijadikan contoh. Upaya tersebut diharapkan mampu menarik minat wisatawan untuk datang menuju lokasi wisata bahari.
2. Perlu adanya penerangan jalan pada jalur menuju lokasi serta pada area lokasi wisata bahari di kabupaten malang. Upaya ini dilakukan guna menerangi wisatawan yang hendak datang berkunjung ataupun yang pulang melintasi jalan yang sepi serta kawasan area wisata guna meningkatkan kenyamanan wisatawan.

3. Penambahan atraksi wisata untuk menghibur wisatawan yang berkunjung kelokasi wisata bahari agar terhibur dan merasa nyaman serta dapat berkesan pada wisatawan yang berkunjung sehingga sepulangnya nanti mereka dapat bercerita dan dapat memancing minat wisatawan lain untuk berkunjung.
4. Penambahan jumlah petugas kebersihan pada wisata bahari yang sering dikunjungi seperti Pantai Balekambang, Pantai Ngliyep dan Sendang Biru. Upaya perlu dilakukan mengingat semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung maka dirasa perlu guna meningkatkan kebersihan lingkungan serta kenyamanan.
5. Tindak tegas bagi wisatawan yang melakukan pelanggaran atau merusak seperti membuang sampah sembarangan, coret-coret dinding atau objek yang ada pada lokasi wisata sehingga pelaku merasa jera serta tidak akan mengulangi tindakannya lagi. Upaya tersebut dilakukan guna menjaga keasrian serta keindahan lokasi wisata bahari di Kabupaten Malang.
6. Pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha cinderamata guna meningkatkan serta menggali potensi lain yang bisa dijadikan sebagai produk unggulan dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Upaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Raja Grasindo.
- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grasindo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2010
- Bratakusuma, Deddy, Supriady dan Solihin, Dadang. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan. Pemerintah Daerah*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Chalik, E.A. 1996. *Panduan Sadar Wisata I*. Jakarta: Kadit Bina Wisata Nusantara.
- CNN. 2017. *Melihat Terumbu Karang Terindah di Dunia*. Diakses melalui <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170220145343-445-194732/melihat-terumbu-karang-terindah-di-dunia/>. Pada tanggal 20 November 2017 pukul 16.00 WIB
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Hardiana, Indrita. 2014. *Menuju Indonesia sebagai Negara Poros Maritim*. Diakses melalui <http://setkab.go.id/menuju-indonesia-sebagai-negara-poros-maritim/>. Pada tanggal 20 November 2017 pukul 16.00 WIB
- HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Ichsan, M Ratih dan Trilaksono. 1989. *Administrasi Keuangan Daerah: Pengelolaan dan Penyusunan APBD*. Malang: Brawijaya University Press.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Fak. Sospol - UGM.
- Karyono, Hari. 1997. *Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kristiadi J.B. 1991. *Peran aparatur Pemerintah Dalam Era Pembangunan*. Bandung: Sesimpol Lembang.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang 2010
- Mann. 1994. *Fundamentals of Aquatic Ecology*. Oxford: Blackwell Scientific Publication.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Muljadi. 2009. *Kepariwisataaan dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

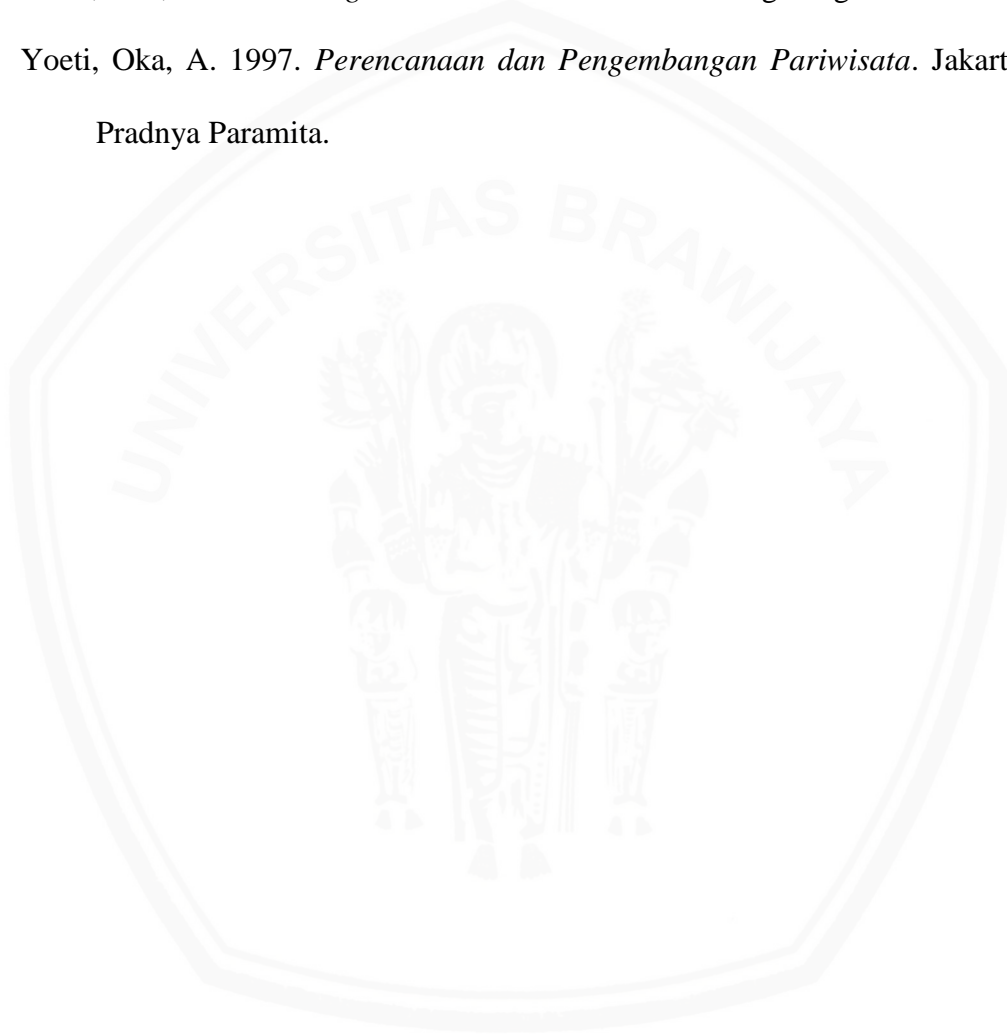
- Ndraha T. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat. Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pendit, I Nyoman, S. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2008. Tentang pemindahan ibu kota kabupaten malang dari wilayah kota malang ke wilayah kecamatan kepanjen kabupaten malang
- Pitana, I. Gede dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Siagian, S.P. 1982. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Spillane J.J. 1987. *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suswanto, Gamal. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syamsudin, Lukman. 2007. *Manajemen keuangan perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3S.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3 tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 28. Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yoeti, Oka, A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa

Yoeti, Oka, A. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 278 /UN10.3/IN / 2017

Lampiran : -

Hal : Riset/survey

Kepada : Yth Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Imron Rosyadi

Alamat : Jl. Bandulan 1F/10, Malang

NIM : 115030607111020

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Tema/Judul : Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Wisata Bahari Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang)

Lamanya : 24 Februari – 28 April 2017

Peserta : 1 (satu) orang

Kami percaya bahwa demi pembinaan pendidikan kita, maka Bapak/Ibu/Saudara bersedia membantu kami.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih

Malang, 20 Februari 2017

a/n Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Dr. CHORRUL SALEH, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ ~~1255~~ /35.07.207/2017

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Fak. Ilmu Administrasi UB Malang Nomor : 2778/UN10.3/PN/2017

Tanggal : 20 Februari 2017 Perihal : Ijin Riset

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan Ijin Riset oleh :

Nama / Instansi : Imron Rosyadi

Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Wisata Bahari
Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

Daerah/tempat kegiatan : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

Lamanya : 24 Februari s.d 28 April 2017

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 23 Februari 2017

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang

Kasubid Wawasan Kebangsaan



Penata
NIP. 196801251992031004

Tembusan :

Yth.

1. Dekan Fak. Ilmu Administrasi UB Malang
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang
3. Mhs / Ybs
4. Arsip



Restoran di Kabupaten Malang 2014 - 2016

Kecamatan	2014	2015	2016
010. Donomulyo	-	-	-
020. Kalipare	-	-	-
030. Pagak	-	-	-
040. Bantur	-	-	-
050. Gedangan	-	-	-
060. Sumbermanjing	7	7	7
070. Dampit	7	7	7
080. Tirtoyudo	1	1	1
090. Ampelgading	-	-	-
100. Poncokusumo	-	-	-
110. Wajak	-	-	-
120. Turen	16	16	16
130. Bululawang	8	8	8
140. Gondanglegi	6	6	6
150. Pagelaran	-	-	-
160. Kepanjen	23	24	24
170. Sumberpucung	1	1	1
180. Kromengan	-	-	-
190. Ngajum	-	-	-
200. Wonosari	7	7	7
210. Wagir	-	-	-
220. Pakisaji	6	7	7
230. Tajinan	1	1	1
240. Tumpang	7	7	7
250. Pakis	20	20	20
260. Jabung	-	-	-
270. Lawang	12	12	12
280. Singosari	20	21	21
290. Karangploso	14	14	14
300. Dau	18	20	20
310. Pujon	13	13	13
320. Ngantang	8	8	8
330. Kasembon	4	4	4
Jumlah	199	204	204

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

Ketersediaan jumlah kamar dan tempat tidur penginapan di Kabupaten Malang
2011 - 2015

Tahun	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
2011	99	1 696	2 416
2012	103	1 682	2 397
2013	105	1 773	2 653
2014	129	1 930	2 814
2015	129	2 015	2 918

Sumber : BPS Kota Malang

Kecamatan	Hotel Berbintang			Hotel Non-bintang			Losmen			Jumlah		
	Unit	Kamar	Tempat Tidur	Unit	Kamar	Tempat Tidur	Unit	Kamar	Tempat Tidur	Unit	Kamar	Tempat Tidur
010. Donomulyo	-	-	-	2	12	12	-	-	-	2	12	12
020. Kalipare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030. Pagak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040. Bantur	-	-	-	1	10	20	-	-	-	1	10	20
050. Gedangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060. Sumbermanjing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070. Dampit	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1	4	4
080. Tirtoyudo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090. Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100. Poncokusumo	-	-	-	-	-	-	23	86	102	23	86	102
110. Wajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120. Turen	-	-	-	2	45	92	-	-	-	2	45	92
130. Bululawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140. Gondanglegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150. Pagelaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160. Kepanjen	-	-	-	8	232	315	-	-	-	8	232	315
170. Sumberpucung	-	-	-	4	78	106	-	-	-	4	78	106
180. Kromengan	-	-	-	3	49	51	-	-	-	3	49	51
190. Ngajum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200. Wonosari	-	-	-	17	297	375	41	255	262	58	552	637
210. Wagir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220. Pakisaji	-	-	-	1	9	9	-	-	-	1	9	9
230. Tajinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240. Tumpang	-	-	-	-	-	-	2	43	86	2	43	86
250. Pakis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260. Jabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270. Lawang	1	64	197	7	238	288	-	-	-	8	302	485
280. Singosari	1	78	162	3	179	328	-	-	-	4	257	490
290. Karangploso	1	27	54	-	-	-	-	-	-	1	27	54
300. Dau	1	34	51	3	72	95	1	4	4	5	110	150
310. Pujon	-	-	-	5	126	189	-	-	-	5	126	189
320. Ngantang	1	73	116	-	-	-	-	-	-	1	76	116
330. Kasenbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Malang	5	276	580	56	1 347	1 880	68	392	458	129	2 015	2 918

Sumber: BPS Kabupaten Malang

Curriculum Vitae

IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Imron Rosyadi
2. Tempat/ Tanggal Lahir: Malang/ 08 Oktober 1988
3. Agama : Islam
4. Alamat Asal : Bandulan gg 1F 10 RT 05 RW 04
Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun
Kota Malang
5. Alamat Malang : Bandulan gg 1F 10 RT 05 RW 04
Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun
Kota Malang
6. Telp : 085655078798
7. Email : wgattell@yahoo.com



PENDIDIKAN

FORMAL

1. MI RADEN FATAH Malang (1996-2002)
2. SMP SHALAHUDDIN Malang (2002-2005)
3. SMA LAB SCHOOL UM Malang (2005-2008)
4. S1 Universitas Brawijaya (2011-2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Student Entrepreneur Center (SEC) Fakultas Ilmu Administrasi
- | | |
|------------------------|-------------|
| Staff Divisi Jasa | (2012-2013) |
| Ketua Divisi Jasa | (2013-2014) |
| Penasehat Manager Umum | (2014-2015) |

PENGALAMAN KEPANITIAAN

- | | |
|--|--------|
| Ketua Pelaksana Bazar Espriex FIA | (2013) |
| Panitia Seminar Nasional pertemuan entrepreneur se Indonesia | (2013) |